

PUBLIKASI ILMIAH

STRATEGI POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGAMANKAN PENYELENGGARAAN PILKADA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013.

Oleh:
David M. Siahaan, SE.
NPM. A.21211053

ABSTRACT

This thesis discusses the problems in West Kalimantan regional police strategy in securing the organization of local elections in West Kalimantan in 2012 associated with the implementation of election districts / cities in West Kalimantan in 2013 .. From the research using sociological research methods juridical law is concluded, that: In order to safeguard the organization of the elections in 2012 the election of Governor / Deputy Governor and Singkawang elections and securing the implementation of election 2013 District / town in 4 (four) regions, namely the city of Pontianak, Kubu district highways, district and Sanggau Pontianak, Kubu district highways, district and Sanggau Pontianak, the police conduct internal organization that is organizing the parts and Police operational units into a united force and well coordinated organization should also be done externally, namely the Government of Regency / City KPU District / Town, District election Supervisory Committee / City, campaign organizers and community potential in an integrated and coordinated systematically according to the task, roles and functions and responsibilities of each in order to secure the election campaign can be run safely and orderly. Election security system in 2013 in 4 (four) districts / cities, in terms of 7 (seven) forms of implementation can be grouped into three (3) security systems are: System security election campaign with a rally form, face to face, and the meeting limited, security system with a form of election campaign broadcasting through radio and or television, and the system securing the election campaign with a form of dissemination through print and electronic media as well as the installation of props in a public place. The activities were carried out after both the internal organization of the police and together with the relevant agencies, institutions and potential public elections, among others: realize campaigning activities conducive situation, the activity of making an agreement among the political parties contesting the election, the combined strength building activities, deterrence activities (pre-emptive), prevention (preventive) and enforcement (repression).

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah strategi polda kalimantan barat dalam mengamankan penyelenggaraan pilkada kalimantan barat tahun 2012 dihubungkan dengan penyelenggaraan pilkada kabupaten/kota di kalimantan barat tahun 2013.. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pilkada tahun 2012 yaitu pilkad Gubernur/wakil Gubernur dan Pilkada Singkawang dan pengamanan penyelenggaraan pilkada 2013 Kabupaten/kota di 4 (empat) wilayah yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau, Polri melakukan pengorganisasian secara intern yaitu pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polri menjadi suatu kekuatan yang utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota,KPU Kabupaten/Kota,Panwaslu Kabupaten/Kota,panitia penyelenggara kampanye dan potensi masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistimatis sesuai tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada dapat berjalan aman dan tertib. Sistem pengamanan Pilkada tahun 2013 di 4 (empat) Kabupaten/kota, ditinjau dari 7 (tujuh) bentuk pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sistem pengamanan yaitu :

Sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk rapat umum, tatap muka, dan pertemuan terbatas, sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyiaran melalui radio dan atau televisi, dan sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik serta pemasangan alat peraga di tempat umum. Adapun kegiatan yang dilaksanakan setelah dilakukan pengorganisasian baik intern Polri maupun bersama-sama dengan instansi terkait, lembaga Pilkada dan potensi masyarakat antara lain :kegiatan mewujudkan situasi kampanye yang kondusif, kegiatan pembuatan kesepakatan antar partai politik peserta pilkada, kegiatan pembentukan kekuatan gabungan, kegiatan penangkalan (pre-emptif), kegiatan pencegahan (preventif) dan kegiatan penegakan hukum (represif).

Latar Belakang Penelitian

Dalam salah satu agenda pemilihan kepala daerah (pilkada), kompetisi politik merupakan hal mutlak yang harus dilakukan dalam proses demokratisasi daerah. Kompetisi dalam hal ini merupakan bentuk bagaimana calon kepala daerah menggunakan cara yang baik untuk merebut simpati masyarakat atau konstituen. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk membangun demokratisasi daerah, pilkada digunakan sebagai alat untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam hal pemilihan kepala daerah, sebab dalam hal ini masing-masing pihak diposisikan sama tanpa ada diskriminasi.

Ketidakpuasan masyarakat melihat kenyataan calon kepala daerah mereka kalah yang menyebabkan potensi timbulnya konflik antar masyarakat semakin besar. Pada penerapan UU No. 22 Tahun 1999, yang memilih kepala daerah melalui DPRD, memiliki potensi konflik yang besar. Sebab dalam peraturannya, parpol yang berada di dalamnya dapat melakukan lobi politik yang dapat berpotensi pada kecemburuan antar parpol yang menyebabkan “kerusuhan” politik di DPRD. Sebab dalam sistem ini, hukum alam akan berlaku, artinya partai yang memiliki jumlah suara yang besar dan didukung oleh lobi partai, akan memenangkan calon yang mereka ajukan.

Terlalu banyaknya kompromi politik di DPRD, karena partai politik dapat melakukan hal yang sesuai dengan kehendak mereka, yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat melihat mekanisme yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Konflik yang lain adalah konflik antar pendukung calon yang tidak puas dengan kekalahan calon kepala daerahnya, dan berpotensi konflik dengan pendukung calon yang lain. Inilah yang kemudian coba diminimalisir dengan dibuat aturan mengenai pelaksanaan pilkada langsung yang diharapkan memberikan keterbukaan kepada masyarakat guna menyalurkan aspirasi yang mereka kehendaki.

Pasca berakhirnya prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, masyarakat mengalami yang dinamakan dengan dengan eforia otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berbagai perubahannya yang di dalamnya terkandung konsep pilkada langsung guna memilih kepala daerah dengan menggunakan asas keterbukaan masyarakat. Pilkada akan menimbulkan kompetisi politik, karena pilkada langsung terkandung kompetisi yang lebih terbuka dari masing-masing pasangan calon. Hal ini yang kemudian menjadikan harapan masyarakat semakin besar terutama peran mereka dalam proses pilkada langsung tersebut.

Namun di balik eforia pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik yang dikandungnya. Potensi konflik jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah seluruh perencana dan penyelenggara Pilkada langsung. Kalau tidak diantisipasi dengan baik sejak dini, Pilkada bakal menimbulkan konflik politik yang tidak hanya merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benih-benih demokrasi Pancasila di tingkat lokal.

Berjalannya era reformasi yang di dalamnya memiliki potensi konflik dalam Pilkada jelas sangat mengganggu proses penguatan demokrasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Potensi konflik itu bukan karena ketidaksiapan masyarakat, tetapi karena tidak utuhnya penerapan sistem demokrasi lokal, terutama yang disebabkan lemahnya aturan pelaksanaannya.

Jika potensi konflik dalam Pilkada tidak minimalisir, bukan tidak mungkin proses demokrasi ditingkat lokal akan berjalan lamban. Karena sebagaimana diketahui bahwa kehidupan yang demokratis yaitu kehidupan yang di mana masyarakatnya memiliki kebebasan untuk merumuskan kecenderungan politik mereka melalui jalur perserikatan atau perkumpulan, yang di dalamnya memiliki kompetensi yang sehat dan berjalan damai.

Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada adalah meminimalisir potensi-potensi konflik, baik yang terkandung dalam aturan mainnya maupun kendala sosial yang masih membelenggu. Agenda ini harus sejalan dengan pembangunan bertahap budaya politik demokratis, ini bukan suatu pandangan yang merendahkan terhadap perilaku masyarakat politik tertentu, tetapi lebih disebabkan sistem yang kini terbangun lewat berbagai aturan main masih berpotensi memicu munculnya budaya anti-demokrasi.

Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik di Indonesia. Pilkada merupakan perjuangan rakyat Indonesia terhadap demokrasi langsung. Tetapi di balik itu, juga harus diwaspadai terhadap potensi-potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik arah, hanya karena ketidakmampuan dalam mengamankan pelaksanaannya.

Dinamika penyelenggaraan Pilkada sudah diketahui bersama melalui berbagai pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, termasuk munculnya berbagai prediksi terhadap pelaksanaan Pilkada, mulai dari prediksi optimis dengan landasan objektif yang dibumbui rumus-rumus yang memusingkan kepala, hingga prediksi yang asal-asalan sekedar ingin menyenangkan salah satu calon peserta.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung, mungkin berbagai kesulitan, halangan, atau kesalahan dalam proses pelaksanaannya dipastikan menimbulkan perdebatan atau perbenturan pendapat yang bercorak-ragam. Sepanjang pergulatan antara berbagai kepentingan dilakukan dalam koridor demokratis dan dengan cara-cara yang fair, tentu sangat berguna bagi lahirnya ide-ide baru untuk penyempurnaan Pilkada berikutnya.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan perihal menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel, sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian idealnya, setiap warga negara dapat terjamin penggunaan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Tidak dipungkiri, dalam praktiknya pelaksanaan Pilkada selalu menimbulkan gejolak, terbukti tidak ada satupun penyelenggaraan Pilkada yang berjalan *zonder* konflik, yang umumnya berakar dari ketidakpuasan terhadap hasil akhir Pilkada, sebagaimana diketahui dalam *conflict fuctionalism* terdapat konsep *deprivation* dan *sense of injustice*. Pada konsep ini, perasaan

diperlakukan secara tidak adil merupakan penyebab timbulnya konflik. Di luar kemungkinan adanya upaya mobilisasi massa dari pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Munculnya beragam konflik yang menyertai pelaksanaan Pilkada sejatinya ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak lagi sekedar pertarungan untuk memperebutkan kursi nomor satu di daerah yang diharapkan mampu membawa daerah pada kehidupan yang lebih baik, tetapi lebih dari itu adanya sebuah pertarungan antar berbagai kekuatan dengan modal sumber daya yang tidak terbatas, apalagi dengan dibalut oleh satu tujuan “*yang penting calonku menang*”. Padahal, proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya melainkan, lebih dari itu, suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Pengalaman keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang telah berhasil dan berjalan dengan baik dan diakui oleh dunia internasional, hendaknya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib.

Pada Tahun 2012 di wilayah hukum Polda Kalbar ada 2 (dua) kegiatan pengamanan Pilkada, yaitu Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Singkawang yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya situasi kondusif.

Kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi berkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Barat tahun 2012 adalah setiap tahapan dalam Pilkada mulai dari saat pendaftaran dan penetapan pemilih sampai dengan saat pengesahan dan pelantikan. Selain itu dalam Pilkada di Kalbar tahun 2012 juga diwaspadai kemungkinan adanya *money politic* dari rumah ke rumah atau kelompok atau organisasi tertentu bahkan kepada jajaran penyelenggara pilkada. Pengerahan masa dari satu daerah ke daerah lain dalam kampanye dan unjuk rasa juga diwaspadai agar tidak menjadikan kerawanan yang semakin meluas.

Dalam rangka melaksanakan amanat seperti tersebut di atas dan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, agar pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar diperlukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai strategi yang dilakukan oleh Polda Kalbar dan seluruh jajarannya pada setiap tahapan pilkada yang telah diadendakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat sebagai lembaga penyelenggara pilkada yang bersifat mandiri, independen serta nonpartisan. Strategi yang dilakukan oleh Polda Kalbar dilaksanakan melalui operasi Kepolisian Kewilayahan, yaitu “Mantap Praja Kapuas 2012”, sebagai upaya pengamanan rangkaian kegiatan Pilkada Kalbar tahun 2012.

Polda Kalbar dan seluruh jajarannya di bantu TNI, instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Polda dan Satwil dengan sandi “Mantap Praja Kapuas 2012” telah berhasil mengamankan rangkaian tahapan inti Pilkada Kalbar Tahun 2012, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan pencegahan yang didukung kegiatan deteksi dan kegiatan penegakan hukum, sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan Pilkada Kalbar Tahun 2012.

Pada tahun 2013, Polda Kalbar beserta jajarannya kembali melakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan Pilkada, yaitu Pilkada Walikota/Wakil Walikota Pontianak, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pontianak, dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sanggau. Walaupun secara kewilayahan tidak sebesar seperti penyelenggaraan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, namun tingkat kerawanan dan potensi konflik dalam Pilkada Bupati/Walikota dan Wakilnya tahun 2013 ini bermacam-macam yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun Kamdagri, sehingga diperlukan strategi dalam melakukan pengamanan penyelenggaraan Pilkada tersebut agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **STRATEGI POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGAMANKAN PENYELENGGARAAN PILKADA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Strategi apa yang diterapkan oleh Polda Kalimantan Barat sehingga berhasil mengamankan Pilkada Kalimantan Barat Tahun 2012 ?
2. Bagaimana strategi Polda Kalimantan Barat dalam mengamankan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ?

Pembahasan

Strategi Yang Diterapkan Oleh Polda Kalimantan Barat Dalam Mengamankan Pilkada Kalimantan Barat Tahun 2012.

1. Pengertian

- 1) **Strategi** : Menurut **Daoed Yoesoef (1981)**, dapat diartikan sebagai **rencana, cara, siasat**, atau **keahlian** merumuskan suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh, kemudian atas dasar itu dapat diambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- 2) **Mengawal** : Mengandung pengertian “menjaga”, “melindungi” atau “mengamankan” suatu subyek, obyek dan kegiatan tertentu menurut prosedur yang berlaku.

- 3) **Penyelenggaraan Pilkadaakada 2012** : ialah kegiatan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Barat tahun 2012.
- 4) **Kamtibmas/Kamdagri** : adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 1 butir 6 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI).

2. Visi Dan Misi Polri

VISI

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

MISI

- a. melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h. membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building / networking).

TUJUAN

- a. terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional lima tahun ke depan;
- b. tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa perlindungan dan pengayoman oleh Negara serta kepastian dunia usaha;
- c. terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;

- d. terwujudnya kerja sama lintas departemen dan lintas Negara dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;
- e. terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud masyarakat patuh hukum.

3. Peran Polri Dalam Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri , yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [(Pasal 5 (1)].
- b. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [Pasal 2].
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [Pasal 4].

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut sesungguhnya : “bukan merupakan urutan prioritas, sebab ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Karena itu, ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sebagai berikut : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” [Penjelasan Pasal 13]. Jika dioperasionalisasikan terdapat elemen-elemen pokok yang dikandung pengertian Kamtibmas :

- a. **Kondisi dinamis masyarakat:** adalah keadaan tata kehidupan masyarakat yang penuh semangat, terus bergerak untuk menghasilkan perubahan yang membawa kemajuan [KUBI, 1994 : 345].
- b. **Prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional:** ialah rencana pembangunan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa dalam kurun waktu tertentu – jangka panjang, menengah dan tahunan [Propenas 1999-2004].
- c. **Tujuan nasional,** ialah: sebagaimana termaktub pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, bahwa negara: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut serta dalam perdamaian dunia. Kesemuanya itu pelaksanaannya berbasis pada landasan filosofis Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
- d. **Terjaminnya keamanan:** ialah kondisi bebas dari rasa takut pada diri setiap warga masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari segala bentuk gangguan, hambatan, dan ancaman fisik, psikis, keselamatan jiwa, dan harta benda yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal maupun anti sosial.
- e. **Ketertiban:** ialah keteraturan melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan yang diatur berdasarkan hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang berlaku.
- f. **Tegaknya hukum:** ialah: “...*suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan*” [Satjipto Rahardjo, tt: 18-24]. Keinginan hukum tiada lain adalah keinginan rakyat yang dinormatiskan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum berupa ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kebenaran, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- g. **terbinanya ketenteraman,** yang mengandung: (1) kemampuan membina kedamaian tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum; dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh : (a) kepolisian khusus ; (b) penyidik pegawai negeri sipil; (c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa [Pasal 3]. Kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh masing-masing departemen-departemen pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya tetap berada di bawah pembinaan dan koordinasi Polri.

4. Strategi Pengamanan Proses Penyelenggaraan Pilkada

a. Pilkada Kota Singkawang

KPUD Kota Singkawang dengan Surat Nomor 85/KPU-SKW-019-435770/VIII/2012 telah mengumumkan empat pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang telah mendaftar KPUD Kota Singkawang dinyatakan lolos sebagai peserta Pilwako 2012. Keempat pasangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tersebut adalah pasangan Awang Ishak dan Abdul Muthalib dengan nomor urut 1 yang diusung partai Golkar, PPP, PAN, PKB dan PKS, pasangan Henoch Thomas dan Rozanuiddin dengan nomor urut 2, yang diusung Partai Hanura, Kedaulan, PIS, PKNU, PNBKI, PDP, PPPI, PDS, PPNUI, BARNAS,PPRN, Republikan, dan PKDI, kemudian selanjutnya pasangan Hasan Karman dan Ahyadi dengan nomor urut 3 yang diusung PIB, PDIP dan Demokrat, dan pasangan Nusantara dan Tasman dengan nomor urut 4 yang diusung partai Pakar Pangan, dan Gerindra. Adapun profil singkat calon walikota dan wakil walikota singkawang periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Drs H Awang Ishak M.Si dan H Abdul Muthalib,SE.,ME

Drs.H.Awang Ishak M.Si, terlahir di Singkawang pada tanggal 20 April 1949 dan bertempat tinggal Jalan gunung Senujuh Singkawang beragama Islam dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) berpasangan dengan H Abdul Muthalib SE.ME, terlahir di Singkawang pada tanggal 1 April 1970 ber tempat tinggal Jalan Jend Sudirman Singkawang beragama Islam dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2).Pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2012-2017 dengan mengusung :

Visi :

“ Singkawang Aman, Nyaman, Maju, Dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan Dan Argo Industri ”

Misi :

- 1) Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan Masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
- 2) Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih)
- 3) Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah
- 4) Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan
- 5) Melanjutkan pengendalian pemanfaatan SDA agar dapat bermanfaat bagi Kota Singkawang
- 6) Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur transportasi

- 7) Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah
- 8) Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan olahraga serta pengelolaan panti anak yatim piatu dan lansia
- 9) Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintah

2. Henoch Thomas, SE.,MM dan Rozanuddin, SP

Henoch Thomas, SE MM terlahir di Singkawang pada tanggal 12 Oktober 1968 dan bertempat tinggal Jalan Pakin No 1 Kec Penjarangan Jakarta Utara beragama Kristen dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) berpasangan dengan Rozanuddin, SP terlahir di Lampung pada tanggal 27 Maret 1969 ber tempat tinggal Jalan Ratu Sepundak BTN POLRI Singkawang beragama Islam dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1). Pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2012-2017 dengan mengusung :

Visi :

“Singkawang Bercahaya (Bersih,Efektif-Efisien, Rapi, Cerdas, Aman, Harmonis, Yakin, Amanah) ”

Misi :

- 1) Menjamin situasi kondusif berusaha
- 2) Menjamin ketersediaan air bersih
- 3) Menjamin ketersediaan listrik
- 4) Menjamin pendidikan gratis
- 5) Menjamin kesehatan gratis
- 6) Menjamin peningkatan hasil pertanian
- 7) Menjamin peranan aktif pemuda dalam pengembangan kesenian dan olahraga
- 8) Menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat

3. DR Hasan Karman, SH MM dan Drs Ahyadi, MM

DR Hasan Karman, SH MM terlahir di Singkawang pada tanggal 6 Agustus 1962 dan bertempat tinggal Jalan Gunung Poteng Kec Singkawang Barat beragama Kristen dengan pendidikan terakhir Strata 3 (S3) berpasangan dengan Drs Ahyadi, MM terlahir di Pontianak pada tanggal 23 November 1963 ber tempat tinggal Jalan Pulau Natuna Singkawang beragama Kristen dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2). Pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2012-2017 dengan mengusung

Visi :

“ Terwujudnya Kota Singkawang sebagai sentra pembangunan ekonomi di Kalbar yang terpercaya, Aman, Kompetitif, Unik, Memiliki layanan publik yang prima serta berorientasi pengembangan ekonomi rakyat ”

Misi :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kerakyatan yang berdaya asing, mengutamakan kekuatan ekonomi skala UMKM keunggulan potensi daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- 3) Menciptakan iklim investasi dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk memacu pertumbuhan daerah, aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah pinggiran dan pusat kota
- 5) Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance)

4. Nusantara Setiadi, SH MM dan Tasman, S.Pd

Nusantio Setiadi, SH MM terlahir di Singkawang pada tanggal 1 Mei 1964 dan bertempat tinggal Jalan Ciputat Raya No 10 Jakarta Selatan beragama Katholik dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) berpasangan dengan Tasman, S.Pd terlahir di Klaten pada tanggal 15 Maret 1951 bertempat tinggal Jalan Jend Sudirman Singkawang beragama Islam dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1). Pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2012-2017 dengan mengusung

Visi :

“ Bersatu dan Berkerjasama Untuk Mewujudkan Kota Singkawang Yang Damai, Makmur, Modern, Berdaya dan Berbudaya ”

Misi :

Meningkatkan pelayanan publik diberbagai sektor publik seperti peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta pelayanan administrasi bagi masyarakat

- 1) Pembangunan dan peningkatan insfrastruktur standar perkotaan yang tepat sasaran antara lain jalan, jembatan, penerangan, irigasi dan air bersih
- 2) Pembangunan sistem pertanian yang bersifat intergral dengan menjamin ketersediaan pupuk dan bibit /benih dengan harga yang terjangkau dan pemanfaatan lahan-lahan tidur/kosong untuk petani serta menjamin harga jual produk-produk hasil pertanian agar kesejahteraan petani meningkat
- 3) Membangun iklim usaha yang kondusif serta peningkatan jiwa jiwa kewirausahaan /enterpreneuship serta untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota pariwisata yang berbudaya.

Pada perhelatan pilkada ini Pasangan Awang Ishack dan Abdul Muthalib resmi menjadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Singkawang periode 2012 - 2017 setelah dilantik Gubernur Kalimantan Barat. Sebelumnya, ada empat pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang. Keempat pasang itu adalah, Awang Ishak-Abdul Mutalib, Henoch Thomas-Rozanuddin, Hasan Karman-Ahyadi dan Nusantio Setiadi-Tasman. Awang Ishak-Abdul Mutalib memperoleh suara terbanyak pada Pilwako Singkawang , 20 September. Keduanya diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Politik identitas yang mewarnai Pilwako Kota Singkawang di rasakan sangat mempengaruhi situasi Kamtibmas di kota ini. Potensi konflik dalam perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkadakada) di Kalbar lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di daerah lain.

Walaupun KPU Singkawang telah mengumumkan bahwa pasangan Pak Awang-Pak Mutholib sebagai pemenang pilkada Singkawang 2012, berdasarkan suara yang terbanyak diperoleh pasangan ini. Pak Nusantio Setiadi telah mengaku dirinya telah kalah dalam pemilihan, dan telah mengucapkan selamat kepada pasangan yang terpilih, Pak Awang-Pak Mutholib. Tetapi bagi Pak HK masih belum bisa menerima kekalahan ini karena Beliau merasa dirinya diperlakukan tidak adil, pemilihan yang tidak adil, dan ada usaha sistematis untuk mengalahkan dia. Untuk mendapat kepastian, Pak HK harus menempuh jalur hukum.

Beberapa hari yang lalu MK telah menyidang kasus sengketa pilkada Singkawang 2012, sekarang sedang menanti keputusan MK. Sidang sengketa pilkada Singkawang 2012 sempat mendapat perhatian masyarakat KalBar, khusus komunitas Tionghoa Kalbar di Jakarta dan sekitarnya. Dalam sidang MK ini, terdiri tiga hakim. Pak Akil Mochtar bertindak sebagai ketua hakim yang memimpin sidang, Pak Muhamad Alim dan Pak Hamdan Zoelva sebagai anggota hakim.

Dalam artikel ini Cinta Singkawang tidak akan mengomentari, atau memberi opini dari segi perspektif hukum materi yang diuji dalam sidang tersebut. Karena kasus ini belum diputuskan oleh MK, setiap opini di media ada kemungkinan dapat mempengaruhi jalan suatu keadilan (keputusan). Tetapi materi kesaksian yang telah disampaikan dalam sidang boleh kita siarkan.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bersama-sama Kepolisian Resort Singkawang menurunkan 522 anggotanya untuk pengamanan pilkada Singkawang.

b. Pilkada Guberbur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Dalam Pilkadakada Kalbar 2012, partai politik yang dapat mengajukan calon adalah yang pada Pilkada 2009 lalu memperoleh 15% suara, atau memperoleh 15% kursi di DPRD Kalbar atau minimal 9 kursi. Dengan demikian, dari 13 partai yang menempatkan wakilnya di

DPRD Kalbar, hanya ada 3 partai yang dapat mendaftarkan calonnya tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat. Berikut ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar :

1. Pasangan Cornelis- Christiandy Sanjaya

Diusung 5 partai: Koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PDS, Partai PIB, dan PKB memperoleh 672.474 (32,5%) suara dan 22 (40%) kursi pada Pilkada 2009.

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Cornelis | : | Lahir: Sanggau, 27 Juli 1953 (59 tahun) |
| Agama | | Kristen Katolik |
| Suku | | Dayak |
| Alamat | | Jl. Danau Sentarum, Gg. Pak Majid 1, RT 1, RW 39, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota |
| Keluarga | | Frederika, S.Pd. (istri) dan 2 putri; ayah dari dr. Karolin Margret Natasa (Anggota DPR-RI) |
| Pendidikan | | SR Senakin (1966), SMP Senakin (1969), SMA Pontianak (1972), APDN Pontianak (1978), Sarjana Ilmu Pemerintahan Unibraw Malang (1987), Magister Hukum Untan (2004) |
| Karier | | Camat Menjalin (1989–1995), Camat Menyuke (1995–1999), Bupati Landak (2001–2007), Gubernur (2008–sekarang), Ketua DPD PDI-P Kalbar (sekarang), Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar (2010–sekarang) |
| Profil Christiandy Sanjaya | | Lahir: Singkawang, 29 Maret 1964 (48 tahun) |
| Agama | | Kristen Protestan |
| Suku | | Cina |
| Alamat | | Jl. Putri Daranante, Gg. Madrasah 2, RT 2, RW 16, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota |
| Keluarga | | Karyanti Tjung (istri) dan 1 putra |
| Pendidikan | | SD Horeb Singkawang (1973), SD Immanuel Pontianak (1977), SMPN 1 Pontianak (1981), SMAN 3 Pontianak (1984), FKIP Untan (1990), Sarjana Ekonomi UPB Pontianak (1997), Magister Manajemen Untan (2000) |
| Karier | | Kepala SMK Immanuel Pontianak, Anggota DPRD Kota Pontianak (1999–2004), Wakil Gubernur (2008–sekarang) |

2. Pasangan Armyn Ali Anyang - Fathan A Rasyid

Koalisi PPP, Hanura, dan PBB memperoleh 202.920 (9,8%) suara dan 10 (18,2%) kursi DPRD pada Pilkada 2009.

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Armyn Ali Anyang | : | Singkawang, 5 Februari 1956 (56 tahun) |
| Agama | | Islam |
| Suku | | Dayak (ayah), Melayu (ibu) |
| Alamat | | Jl. Untung Suropati, RT 4, RW 22, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan |
| Keluarga | | Angriani Momarena (istri) dan 4 anak |
| Pendidikan | | STM Singkawang, Akabri (1980), Seskoad (1996), Lemhanas (2008) |
| Karier | | Kolonel (2004), Brigjen (2010), Mayjen (2011), Operasi Timtim (1981, 1986, 1994), Operasi PBB Kamboja (1992), Kasiops REM-121/Ambawang (1996), Dandim 1007/Banjarmasin (1997), Wakil Asrendam VII/Tanjungpura (2000), Asrendam VII/Tanjungpura (2003), Danrem 063/SunanGunungJati (2006), Staf Ahli Pangdam I/BukitBarisan (2008), Wakil Asrena Kasad (2009), Kasdam XII/Tanjungpura (2010), Staf Ahli Panglima TNI (2011) |
| Profil Fathan A. Rasyid | | Lahir: Singkawang, 16 Mei 1958 (54 tahun) |
| Agama | | Islam |
| Suku | | Melayu |
| Alamat | | Jl. Dr. Wahidin S., Gg. Sepakat 8/2, RT 4,RW 20, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota |
| Keluarga | | Ardiani (istri); adik dari Burhanuddin A. Rasyid (mantan Bupati Sambas), besan dari Fadel Muhammad (Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mantan Gubernur Gorontalo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) |
| Pendidikan | | Institut Pertanian Bogor (1981), Adelaide University of South Australia (1992) |
| Karier | | Kadis Pertanian Tanaman Pangan Kalbar (2001–2005), Kepala Bappeda Kalbar (2005–2011), Kepala BPBD Kalbar (2011–2012) |

3. Morkes Effendi - Burhanuddin A Rayid

Koalisi Partai Golkar, PAN, PKS, PBR, dan PKNU memperoleh 571.499 (27,6%) suara dan 20 (36,4%) kursi DPRD pada Pilkada 2009.

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Morkes Effendi | : | Ketapang, 8 Maret 1951 (61 tahun) |
| Agama | | Islam |
| Suku | | Melayu |
| Alamat | | Jl. Parit H. Husin I, Gg. Muslimin 1, RT 1, RW 10, Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara |
| Keluarga | | Suma Jenny Heryanti, S.H., M.H. (istri) dan 4 anak |
| Pendidikan | | Magister Hukum Untan (2007) |
| Karier | | Anggota DPRD Ketapang (1992–1999), Ketua DPRD Ketapang (1999–2000), Bupati Ketapang (2000–2010), Ketua DPD Partai Golkar Kalbar (2009–sekarang), Sekjen Lembaga Adat Melayu Serantau (2008–sekarang) |
| Profil Burhanuddin A. Rasyid: | | Lahir: Tebas, 3 November 1952 (59 tahun) |
| Agama | | Islam |
| Suku | | Melayu |
| Alamat | | Jl. Lingkar Kartiasa, RT 20, RW 10, Desa Kartiasa, Kec. Sambas |
| Keluarga | | Hj. Naskah Istar (istri) dan 3 anak; abang dari Fathan A. Rasyid (mantan Kepala Bappeda Kalbar, mantan Kepala BPBD Kalbar) |
| Pendidikan | | MI Tebas, MT Tebas, Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta (1984) |
| Karier | | Kadis Pertanian Sambas (1995–2001), Bupati Sambas (2001–2011), Ketua MABM Sambas (2010–sekarang), Wakil Sekjen DPP PAN (2011–sekarang), Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Kalbar (2011–sekarang) |

4. Tambul Husin - Barnabas Simin

Koalisi Partai Gerindra, PPD, PNBK Indonesia, PKPB, PKPI, PDK, Partai Barnas, PDP, Partai RepublikaN, PKDI, PPPI, Partai Kedaulatan, PPRN, Partai Patriot, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PIS, dan PPDI memperoleh 548.349 (26,5%) suara dan 3 (5,5%) kursi DPRD pada Pilkada 2009.

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Abang Tambul Husin | : | Lahir: Nanga Bunut, 3 Maret 1948 (64 tahun) |
| Agama | | Islam |
| Suku | | Melayu |
| Alamat | | Jl. Melati, RT 3, RW 1, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara |
| Keluarga | | Mega Hartini, B.A. (istri) dan 5 anak (4 putra dan 1 putri) |
| Pendidikan | | SR 6 Nanga Bunut, SMP Subsidi Putussibau, SMAN 2 Pontianak, APDN Pontianak (1973), STIA-LAN Jakarta (1975) |
| Karier | | Dosen APDN Pontianak, Kepala Dispenda Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Bupati Kapuas Hulu (2000–2010), Ketua PBSI Kalbar, Ketua DPD Partai Golkar Kapuas Hulu, Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar |
| Profil Barnabas Simin | | Lahir: Jebeng Darit, 27 April 1948 (64 tahun) |
| Agama | | Kristen Protestan |
| Suku | | Dayak |
| Alamat | | Jl. Kom. Yos Sudarso, Gg. Rambutan 2, RT 1, RW 7, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat |
| Keluarga | | Pdt. Yetje Katrine, S.Th., M.Pd.K. (istri) dan empat anak |
| Pendidikan | | Calvary Teological Seminary Melbourne, Lemhanas KSA X (2002), Training Centre Seoul |
| Karier | | Guru Agama, Pendeta TNI-AU (1975–1986), Pendeta GPKB, Wakil Ketua DPW MKGR, Penasihat DAD Kalbar, Ketua Sinode GKTl |

Pada perhelatan pilkada ini pasangan incumbent Cornelis-Christiandy Sanjaya unggul dari pesaing beratnya, Morkes Effendi dan Burhanuddin A Rasyid, dalam perebutan kursi Gubernur Kalimantan Barat. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan gubernur 2012, pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya memperoleh suara 1.225.185 atau 52,13 persen.

Sementara pasangan Morkes Effendi - Burhanuddin A Rasyid memperoleh 591.081 suara atau 25,15 persen, pasangan Armyn Ali Anyang - Fathan A Rasyid memperoleh suara 361.744 atau 15,39 persen, dan Tambul Husin - Barnabas Simin hanya memperoleh 172.016. atau 7,32 persen.

Jumlah surat suara yang sah 2.350.026, dengan jumlah suara yang tidak sah 38.119. Jumlah partisipasi pemilih 2.388.145 atau 70,69 persen dari daftar pemilih tetap yang

mencapai 3.377.997. Pasangan nomor urut 1, Cornelis - Christiandy Sanjaya, memperoleh suara tertinggi di 10 Kab/Kota di Kalimantan Barat. Sementara nomor urut 2, pasangan Armyn Ali Anyang - Fathan A Rayid tertinggi di Kota Pontianak. Pasangan dengan nomor urut 3, Morkes Effendi - Burhanuddin A Rayid tertinggi di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kayong Utara. Dan nomor urut 4, pasangan Tambul Husin - Barnabas Simin tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2013-2018, Jumat malam 28 September 2012, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, AR Muzammil, mempersilakan bagi pihak yang merasa berkeberatan untuk menggugat hasil keputusan tersebut.

Seperti diketahui, ada empat calon yang maju di Pilgub Kalbar 2012 ini, yakni pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya dicalonkan oleh koalisi PDI Perjuangan-Demokrat dan tiga partai politik. Pasangan Ali Anyang - Fathan A Rasyid dicalonkan koalisi PPP-Hanura-PBB. Sedangkan pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid dijagokan oleh koalisi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dan tiga partai politik. Sementara pasangan Tambul Husin -Barnabas Simin dicalonkan oleh koalisi Gerindra dan 17 partai politik.

Polda Kalbar mengerahkan sebanyak 8.946 personel dan dibantu oleh Komando Daerah Militer XII Tanjungpura sebanyak 2.074 personel pada pengamanan Pilkada Gubernur Kalbar.

c. Strategi Polda Kalbar dalam pengamanan Pilkada Tahun 2012

Adapun yang menjadi Strategi Polda Kalimantan Barat dalam pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi memelihara dan meningkatkan kondisi Kamtibmas yang kondusif melalui pola tindak preemtif, preventif dan penegakan hukum :
 - a. Deteksi akurat faktor-faktor krimonogen (FKK) agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan (*Police Hazart/PH*).
 - b. Melakukan pemetaan tingkat kerawanan daerah dan implementasi pemolisian masyarakat (*Comunity Policing*) ;
 - c.. Mencegah sedini mungkin agar ambang gangguan (*Police Hazart/PH*) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (AF).
- 2) Strategi Penyiapan Kemampuan Personil, Sarana dan Prasarana Operasional :
 - a. Melakukan Inventarisasi Personil, Pembinaan, Pelatihan, Penugasan, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai komponen tugas pengamanan dan masyarakat.

- b. Melaksanakan DIKLAT khusus untuk meningkatkan keterampilan personil dalam melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pada setiap tahapan Pemilihan Umum.
 - c. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan yang memadai dan bersesuaian dengan kondisi geografis, luas wilayah, kondisi sossebud masyarakat, maupun TAGH Kamtibmas yang dihadapi.
 - d. Menyiapkan Sarana Komunikasi dan Administrasi yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya.
- 3) Strategi mewujudkan Tugas Pengawalan dan Pengamanan Pada Setiap Tahap Kegiatan Pilkadaada :
- a. Melakukan tugas pemantauan, pengendalian, pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan, patroli, dan tindakan yang diperlukan sesuai JUKLAK, JUKNIS, PROTAP, serta TAGH yang dihadapi.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pengamanan Terkait, PASWASLU, SATGAS PARPOL, Petugas TPS, Lurah, Kepala Desa, Ketua RW/RT, dan pihak lainnya yang diperlukan untuk mengawal jalannya pemilihan umum 2009 secara aman, tertib, lancar, dan damai.
 - c. Melakukan upaya-upaya diskresi kepolisian secara fungsional yang dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Polda Kalimantan Barat dalam mengamankan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013 dihubungkan dengan pemeliharaan Kamtibmas dan Kamdagri

1. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/kota tahun 2013 di Kalimantan Barat

Pasca pilkadakada Gubernur/Wakil Gubernur dan Waikota/wakil walikota tahun 2012 Polda Kalimantan Barat melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi-strategi di atas. Pada tahun 2013 kalimantan barat kembali di meriahkan dengan pesta demokrasi di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota yang di selenggarakan secara serentak, antara lain yaitu Pilkada Kota Pontianak, Pilkada Kubu Raya, Pilkada Kabupaten Pontianak dan Pilkada Kabupaten Sanggau. Adapun jadwal dan tahapan pilkadakada sebagai berikut :

- 12–18 Juni: Pendaftaran pasangan calon kepala daerah:
- 22 Juni: Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- 22 Juni – –12 Juli: Perbaikan DPS.
- 13–14 Juli: Pencatatan data pemilih tambahan.

- 31 Juli: Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 3 Agustus: Pengumuman calon yang memenuhi syarat.
- 5 Agustus: Penetapan nomor urut calon.
- 2—15 September: Kampanye.
- 14—16 September: Penyampaian kartu pemilih dan undangan memilih.
- 19 September: Pemungutan suara.
- 25 September: Penetapan hasil penghitungan suara.

Jika diperlukan:

- 1—3 November: Kampanye Putaran II.
- 7 November: Pemungutan suara Putaran II.
- 13 November: Penetapan hasil penghitungan suara Putaran II.
- 23 Desember: Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terpilih.
- 5 Februari 2014: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau terpilih.
- 14 Februari 2014: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih.
- 13 April 2014: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak terpilih.

1). Pilkada Kota Pontianak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak sudah menetapkan pasangan calon (paslon) yang berhak ikut serta di Pilkada Kota Pontianak. Penetapan paslon juga disertai pengundian nomor urut. 6 (enam) pasang calon yang sudah mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, dinyatakan lolos menjadi peserta dan siap bertarung dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, 19 September 2013 mendatang. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut peserta pilkada di Grand Hotel Mahkota Pontianak, Sabtu (3/8/2013) siang.

Usai membacakan peraturan dan perundang- undangan, serta tata cara proses penentuan nomor urut, anggota KPU Kota Pontianak, Erwin Andhika mempersilahkan semua calon yang dipersilakan mengambil nomor urut ini juga didasarkan dengan nomor urut penetapan yang didasarkan nomor pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kota Pontianak nomor 34/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 tanggal 3 Agustus 2013:

- Nomor urut 1. H. Gusti Hersan Aslirosa dan Syarif Ismail Alkadri,
- Nomor urut 2. Iwan Gunawan dan Andreas Acui Simanjaya,
- Nomor urut 3. H. Sutarmidji dan Ir. Edi Kamtono,
- Nomor urut 4. Paryadi, S.Hut dan Sebastian. SE,
- Nomor urut 5. Firman Muntaco dan Erik S.Martio
- Nomor urut 6. Zulkarnaen Siregar dan Paryono.

Berikut pasangan calon beserta partai pendukungnya:

1. Pasangan Gusti Hersan Aslirosa dan Syarif Ismail Alkadri diusung oleh Partai Hanura, PKB, PBB, PBR, PKNU, serta Partai Buruh dengan perolehan dukungan suara 24,44 persen.
2. Pasangan Iwan Gunawan sebagai Walikota dan Acui Simanjaya sebagai wakil Walikota dari calon perseorangan dengan perolehan dukungan suara 27.530 suara.
3. Pasangan Zulkarnaen Siregar dan Paryono dari calon perseorangan dengan perolehan dukungan suara sebanyak 29.379 suara.
4. Pasangan H.Sutarmidji dan Ir. H. Edi kamtono.MM. MT yang diusung PKPB, PKS, PAN, PPP, PDI Perjuangan dengan jumlah kursi 18. Perolehan jumlah dukungan suara 40,00 persen.
5. Pasangan Paryadi, S.Hut dan Sebastian, SE, diusung Partai Demokrat, jumlah kursi 8 dan perolehan dukungan suara 17,78 persen.
6. Pasangan Firman Muntaco dan Erik Suseno Martio yang diusung PPRN, Barnas, PKPI, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme, PDP, Partai Golkar, PDS dan Partai Patriot dengan perolehan dukungan suara sebesar 19,41 persen.

Hasil perolehan suara Pilkada Kota Pontianak 2013:

| Pasangan Calon | Perolehan Suara | % Suara |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Sutarmidji dan Edi Rusdi Kamtono | 139.061 | 52,71% |
| Paryadi dan Sebastian alias Ng Yong Liak | 53.848 | 20,41% |
| Firman Muntaco dan Erick Suseno Martio | 50.783 | 19,25% |
| Gusti Hersan Aslirosa dan Syarif Ismail Alkadrie | 8.918 | 3,38% |
| Zulkarnaen Siregar dan Paryono | 5.930 | 2,25% |
| Iwan Gunawan dan Andreas Acui Simanjaya | 5.277 | 2,00% |
| <hr/> | | |
| Suara Sah | 263.817 | 98,58% |
| Suara Tidak Sah | 3.559 | 1,42% |
| <hr/> | | |
| Partisipasi Pilih | 267.614 | 64,50% |
| Daftar Pilih Tetap | 414.918 | 100,00% |

2). Pilkada Kubu Raya

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Idris Maheru mengatakan hingga batas waktu pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya

resmi ditutup, tercatat ada lima pasangan calon yang telah mendaftarkan diri. Dari lima pasangan calon, satu diantaranya menggunakan jalur perseorangan dan empat lainnya diusung oleh Partai Politik.

Kelima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar yaitu :

1. H. Rusman Ali, SH & Drs. Hermanus Darus, M. Si, di usung oleh tiga Partai Politik yakni, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Bintang Reformasi dengan jumlah perolehan 51.678 (23,15%) Suara Sah dan 14 Kursi (31,11%), dengan Ketua Tim Kampanye Sujiwo, SE.
2. Pasangan Djohansyah & Ahok Angking pada Senin (17/6) Pukul 10.05 WIB yang di usung oleh dua Partai Politik yakni, Partai Demokrasi Kebangsaan dan Partai Demokrat dengan perolehan 7 kursi (15,56%), dengan Ketua Tim Kampanye Ir. Usman.
3. Pasangan dari jalur Perseorangan yakni H. Muda Mahendrawan, SH & H. Ir. Suharjo, MMA , juga mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dengan jumlah dukungan 87.550 dari 9 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, dengan Ketua Tim Kampanye M. Nasir.
4. Pasangan David Maryansyah, S.Sos & Hasbulloh, SH mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang di usung oleh Sebelas Partai Politik yakni Partai Kedaulatan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa, Partai Republik Nusantara, Partai Bulan Bintang, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia dengan jumlah suara sah pada Pilkada Tahun 2009 berjumlah 43.860 suara sah (19,65%), dengan Ketua Tim Kampanye H. Abdurrasyid.
5. Pasangan Drs. Kamaruzzaman, MM & Andi Salmah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang di usung oleh tiga Partai Politik yakni Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta Partai Golongan Karya dengan jumlah kursi sebanyak 8 kursi (17,78%), dengan Ketua Tim Kampanye Masdar. AR, SE.

Pada pilkada Kabupaten Kubu-Raya ini pasangan H. Rusman Ali, SH & Drs. Hermanus Darus, M. Si, berhasil memenangkan pilkada tersebut. Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2013 – 2018 yang dibuka oleh ketua KPU KKR, Idris Maheru, hanya dihadiri empat saksi dari lima pasangan calon. Sedangkan saksi paslon nomor urut 1 tidak hadir dalam sidang pleno.

Selain para saksi, tampak hadir Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, Ketua KPU Prov Kalbar, Umi R, Ketua KPU Kab Kubu Raya, Idris Maheru beserta anggota Komisioner, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Hariyanta, Dandim 1201/Mempawah Letkol Kav Bambang S, Ketua Panwaslu, Mujiono beserta anggota Panwascam serta para saksi-saksi 5 Pasangan Calon dari kecamatan se-Kab Kubu Raya.

Rapat pleno, menetapkan Rusman Ali dan Hermanus sebagai pemenang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2013-2018 dengan perolehan suara sebanyak 111.990 pemilih. Sementara, diurutkan kedua ditempati pasangan Muda Mahendrawan dan Suharjo dengan perolehan suara 107.379 pemilih.

Urutan terbesar ketiga, diperoleh pasangan David Maryansyah dan Hasbulloh dengan mengantongi 23.199 pemilih. Pasangan calon Djohansyah dan Ahok Angking berada pada posisi keempat dengan memperoleh suara 8.144 pemilih. Sedangkan urutan terakhir, pasangan calon Kamaruzzaman dan Andi Salmah. Adapun jumlah Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang memilih 259.724 suara dengan jumlah pemilih suara sah sebanyak 255.801 suara dan suara tidak sah 3.923 suara.

Usai pembacaan rekapitulasi, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon No Urut 5 H Rusman Ali–Hermanus sebagai Pasangan Terpilih oleh Sekretaris KPU Kab Kubu Raya. Kemudian, agenda dilanjutkan penandatanganan BAP Hasil Rekapitulasi oleh Ketua KPU Kab Kubu Raya beserta anggota. “Untuk pengajuan keberatan dari pasangan calon bisa dilakukan 3 hari setelah Sidang Pleno berlangsung,” kata Idris.

Dilain sisi, saat sidang pleno sedang berlangsung, ratusan masyarakat Kubu Raya yang tergabung dalam GEMAR (Gerakan rakyat Anti Money Politic) yang dikomandoi oleh koorlap Aksi, Andi Suwandy melakukan unjuk rasa menuntut penundaan sidang pleno penetapan oleh KPU terhadap penghitungan suara hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2013-2018. Sebab, dianggap catat hukum, karena adanya dugaan terjadi Money politic yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Ratusan personil kepolisian di siagakan untuk pengamanan tersebut.

Kapolresta Pontianak, AKBP Harianta mengatakan pihaknya bersama aparat umum lainnya akan melakukan pengamanan pelaksanaan pilkadakada semaksimal mungkin. Satu di antara cara yang dilakukan dengan melaksanakan perisapan gelar pasukan. Sebanyak 1600 personel yang tergabung dari beberapa personel gabungan dari polda untuk mengamankan wilayah hukum Kubu Raya dan Kota Pontianak .

Dari jumlah keseluruhan sebanyak 1600 personel, ada backup Polda Kalbar dari Brimob, Shabara dan intansi terkait lainnya. Dalam hal ini kita tidak bekerja sendiri karena kita merupakan satu kesatuan yang menginginkan pelaksanaan pilkada lancar aman dan nyaman," ujarnya saat membacakan sambutan.

3). Pilkada Kabupaten Pontianak

Enam pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Pontianak telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pontianak. Berikut daftar pasangan bakal calon dan partai pengusungnya beserta nomor urutnya :

1. H Agus Salim-M Ghazali. Partai Hanura 3 kursi, PDP 2 kursi, PKS 1 kursi, PKNU 1 kursi, Barnas 1, kursi, PPI 2 kursi, PIS 1 kursi, Total kursi: 12 kursi.
2. Rubijanto-M Shaleh. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 2 kursi, Partai Pemuda Indonesi (PPI) 2 kursi, Partai Pakar Pangan 1 kursi, PBR 2 kursi, Partai Merdeka 1 kursi, PPNUI 3 kursi, Partai Nasional Republik 1 kursi, Total kursi: 12 kursi.
3. Mochtaria M Nuh-Edi Gunawan (Menawan). Maju dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan 14.175, masih kurang 755 untuk memenuhi syarat dukungan minimal 14.930 atau 5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pontianak.
4. Sabli Awaludin-Mui Hat. PKPB 2.035 suara sah, PPRN 1.440 suara sah, Gerindra 2.737 suara sah, PKPI 834 suara sah, Partai Kedaulatan 1.064 suara sah, PNI Marhaen 853 suara sah, PMB 1.908 suara sah, PDK 2.025 suara sah, Partai Pelopor 1.024 suara sah, PNBK 899 suara sah, PBB 1.306 suara sah Partai Patriot 1.035 suara sah, PPNUI-Buruh 4.104
5. Sunandar-Martinus (SMS)Maju dari jalur perseorangan dengan dukungan 15.602, dari syarat minimal 14.930.
6. Ria Norsan-Gusti Ramlana. Partai Golkar 6 kursi, PDIP 5, PPP 4, PAN 3, Demokrat 4, Total kursi: 22.

Pada pilkada ini pasangan Ria Norsan-Gusti Ramlana ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Mempawah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019 mendatang.

Kapolres Pontianak, AKBP Hady Poerwanto mengatakan pihaknya bersama aparat umum lainnya akan melakukan pengamanan pelaksanaan pilkadakada semaksimal mungkin. Satu di antara cara yang dilakukan dengan melaksanakan perisapan gelar pasukan. Sebanyak 573 personel yang tergabung dari beberapa personel gabungan dari polda.

Dari jumlah keseluruhan sebanyak 573 personel, ada backup Polda Kalbar dari Brimob, Shabara dan intansi terkait lainnya. Dalam hal ini kita tidak bekerja sendiri karena kita merupakan satu kesatuan yang menginginkan pelaksanaan pilkada lancar aman dan nyaman," ujarnya saat membacakan sambutan.

4. Pilkada Sanggau

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sanggau resmi menutup pendaftaran bagi kandidat bakal calon (Balon) Bupati/Wakil Bupati Sanggau, Selasa (18/6/2013) pukul 16.00 WIB. Hingga hari terakhir, sebanyak lima kandidat Balon mendaftar. Kelima kandidat, masing-masing empat pasang diusung Parpol. Sementara, satu pasangan melalui jalur peseorangan atau independen. Kelima kandidat maupun pengusung Balon Bupati/Wakil Bupati Sanggau yang mendaftar untuk mengikuti Pilkada Sanggau, 19 September mendatang yakni.

- 1) Lambok Siahaan-Gusti Yusri. Pasangan ini diusung oleh gabungan Partai Politik, antara lain Golkar, Gerindra, PPRN, PPI, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, PPNUI dan PMB. Jumlah suara sah 44.101.
- 2) Abang Ishar-Khironoto. Pasangan independen ini masih kekurangan dukungan sah sebanyak 4.998. Dukungan sah sesuai yang baru bisa dikumpulkan yakni 19.029.
- 3) Nasri Alisan-Losianus. Pasangan ini diusul oleh gabungan Partai Politik yakni PAN sebanyak tiga kursi dan PDS sebanyak tiga kursi.
- 4) Paolus Hadi-Yohanes Ontot. Pasangan ini diusung oleh PDI-Perjuangan sebanyak 6 kursi, dan beberapa Partai Politik pengusung lainnya yakni PKPB, PDP, PNBK, Hanura, PNI Marhaenisme, PKPI, PKPIB, PBB, dan Pakar Pangan.
- 5) Moses Hermanus Munsin-Supardi. Pasangan ini diusung dua Parpol yakni Partai Demokrat sebanyak empat kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan dua kursi.

Pada pilkada ini pasangan Paolus Hadi-Yohanes Ontot ditetapkan sebagai bupati dan Wakil bupati terpilih oleh KPUD Sanggau. Paolus Hadi yang menjabat sebagai Wakil Bupati Sanggau dengan menggandeng Yohanes Ontot (YO) itu meraup suara terbanyak.

Pasangan PH-YO unggul di seluruh kecamatan, yakni 15 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, dengan perolehan suara sebanyak 68.527 pemilih atau 56.73 persen. Menurut hitungan cepat itu, pasangan PH-YO menang mutlak, dikejar pasangan nomor urut 2, dr Lambok Siahaan-Gusti Yusri SH dengan perolehan suara 20.421 atau 16.91 persen. Kemudian disusul pasangan nomor urut 3, HM Munsin dan Supardi dengan perolehan suara 13.769 atau 11.40 persen.

Unggulan keempat, diraih pasangan calon nomor urut 1, Nasri Alisan-Losianus dengan perolehan suara 11.836 atau 9.80 persen. Kemudian, unggulan kelima ditempati pasangan nomor urut lima, Abang Ishar dan Khironoto dengan perolehan suara 6.240 atau 5.17 persen.

Terkait pengamanan selama Pilkada Sanggau 2013, Kabag Ops Polres Sanggau, Kompol Muhammad Roni Mustofa Slk menegaskan selain personil di Polres maupun Polsek. Pihaknya juga akan dibantu oleh tim dari Polda serta Brimob. Personil yang kita libatkan 3/4 dari keseluruhan anggota yang ada. Itu ditambah, diback-up Polda, totalnya anggota 675 personil.

Strategi Polda Kalimantan Barat pemeliharaan Kamtibmas dan Kamdagri di daerah penyelenggaraan Pilkada

Adapun Strategi Polda Kalimantan Barat dalam mengamankan Pilkada Kabupaten/Kota dikamimantan Barat Tahun 2013 di hubungkan dengan pemeliharaan Kamtibmas dan kamdagri adalah sebagai berikut :

I. Kerja sama antara Polda dan Polres

1). Melakukan kerjasama Pengorganisasian kekuatan antara Polda Dan Polres di tempat di daerah berlangsungnya Pilkada .

a. Unsur Pimpinan.

- 1) Kepala Kepolisian Resort disingkat Kapolres.
- 2) Wakil Kepala Kepolisian Resort disingkat Waka Polres.

b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf.

- 1) Bagian Operasi disingkat Bag Ops.
- 2) Bagian Pembinaan Kemitraan disingkat Bag Binamitra.
- 3) Bagian Administrasi disingkat Bag min

c. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayan.

- 1) Urusan Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Urtelematika.
- 2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin, disingkat P3D.
- 3) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.
- 4) Seksi kedokteran dan kesehatan, disingkat Sidokkes (pengembangan pada wilayah tertentu).

d. Unsur Pelaksana Utama.

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK.
- 3) Satuan Inteljen Keamanan, disingkat Sat Intelkam.
- 3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim.
- 4) Satuan Samapta, disingkat Sat Samapta.
- 5) Satuan Lalu Lintas, disingkat Sat Lantas.
- 6) Satuan Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya, disingkat Sat Narkoba (pengembangan pada wilayah tertentu).
- 7) Satuan Pengamanan Obyek Vital, disingkat Sat-Pam Obvit (pengembangan pada wilayah tertentu).
- 8) Satuan Pengamanan Pariwisata, disingkat Sat-Pam Pariwisata (pengembangan pada wilayah tertentu).
- 9) Satuan atau Unit Polisi Perairan, disingkat Sat Pol air atau Unit Pol air (sesuai kebutuhan).

Adapun peran, tugas dan tanggung jawab bagian dan satuan serta urusan / unit dikaitkan dengan pelaksana pengamanan kampanye Pilkada dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Bagian Operasi (Bag Ops).

Bagian Operasi bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi Kepolisian, sesuai tugasnya maka Bagian Operasi mempunyai peran membuat rencana sistem pengamanan kampanye Pilkada dari awal pelaksanaan sampai akhir kampanye Pilkada dan pelaksanaan tugasnya dipertanggung jawabkan kepada Kapolres, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama pengamanan kampanye Pilkada dikendalikan Waka Polres.

Bagian Operasi (Bag Ops) setelah mendapat perintah Kapolres tentang adanya pemberlakuan Rencana Operasi Pilkada 213 segera menjawab " **Mengerti dan siap melaksanakan operasi pengamanan Pilkada tahun 2013** ". Selanjutnya membuat Surat Perintah Operasi dengan dibantu oleh Bagian dan Satuan serta Urusan / Unit guna merumuskan Target Operasi (TO), Sasaran Operasi, Cara Bertindak (CB) dan penyusunan kekuatan pengamanan. Karena kampanye Pilkada merupakan sub sistem pengamanan Pilkada dan dapat dikatakan tahap Pilkada yang paling rawan karena sering terjadi benturan massa peserta Pilkada maka perlu dirumuskan sistem pengamanan kampanye, hal ini perlu mendapat penekanan karena sering Kesatuan Operasional Dasa tidak memperhatikan hal ini (biasanya menyatukan pengamanan kampanye dengan pengamanan Pilkada secara keseluruhan).

b. Bagian Operasional merupakan koordinator pengamanan.

Bagian Operasi dalam pelaksanaan tugasnya adalah dapat mengkoordinir Bagian dan Satuan serta Urusan / Unit lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Inteljen Keamanan.
 - a) Mendapatkan Perkiraan Keadaan Inteljen Keamanan tentang perkiraan situasi Kamtibmas selama pelaksanaan kampanye Pilkada, baik perkiraan khusus (Kirsus) maupun perkiraan cepat (Kirpat) harian dan mingguan.
 - b) Mendapatkan rencana kegiatan Sat Intelkam dalam rangka pengamanan kampanye.
 - c) Mendapatkan data kekuatan personil Sat Intelkam yang akan dilibatkan dalam pengamanan kampanye.
 - d) Mendapatkan data partai peserta Pilkada yang mengikuti kampanye Pilkada.
 - e) Mendapatkan data lokasi kampanye Pilkada.
 - f) Mendapatkan data juru kampanye masing-masing partai peserta kampanye Pilkada (nama, alamat).
 - g) Mendapatkan jadwal pelaksanaan kampanye Pilkada.
 - h) Mendapatkan data pelanggaran atau kejahatan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada tahun 1999 dan 1997.

- i) Mendapatkan data alamat kantor partai peserta Pilkada.
- j) Mendapatkan data pimpinan dan pengurus partai peserta kampanye Pilkada Kabupaten / Kota.
- k) Mendapatkan data pejabat pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang bertempat tinggal di wilayahnya.
- l) Mendapatkan data proyek vital dan obyek vital yang ada
- m) Mendapatkan data kantor perwakilan negara asing.
- n) Mendapatkan data tempat tinggal perwakilan asing.
- o) Mendapatkan data orang asing yang tinggal atau bermukim.
- p) Mendapatkan data lokasi tempat ibadah, tempat pendidikan.
- q) Mendapatkan data daftar Panwaslu Kabupaten / Kota (nama dan alamat).
- r) Mendapatkan data potensi masyarakat terbelah maupun tokoh-tokoh (masyarakat, pemuda, agama, adat) yang berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah (lokal).
- s) Mendapatkan data daftar Pamatlu dan alamat Kabupaten / Kota (nama dan alamat).
- t) Mendapatkan data alat khusus Satuan Intelkam yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

2) Koordinasi Bagian Operasi dengan Bagian Binamitra.

- a) Mendapatkan data kekuatan personil Bagian Binamitra yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan rencana kegiatan Bagian Binamitra dalam rangka pengamanan kampanye.
- c) Mendapatkan data tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai peserta Pilkada, tokoh pemuda dan tokoh lainnya yang akan dijadikan mitra Polri dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data kekuatan Satpam.
- e) Mendapatkan data kekuatan Polsus.
- f) Mendapatkan data Pos Kamling dan Kapos Kamling.
- g) Mendapatkan data Pok Sadar Kamtibmas.
- h) Mendapatkan data Pok Kadarkum.
- i) Mendapatkan data Babinkamtibmas.
- j) Mendapatkan data kekuatan Satgas partai peserta kampanye Pilkada.

- k) Mendapatkan data kekuatan Orari / Rapi yang bersedia dilibatkan dalam pengamanan kampanye.
- l) Mendapatkan data kekuatan Pramuka yang terlibat dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- m) Mendapatkan data pemadam kebakaran baik dari Dinas PMK maupun pemadam kebakaran dari perusahaan-perusahaan yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- n) Mendapatkan data alat khusus Bagian Binamitra yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

3) Koordinasi Bagian Operasi dengan Bagian Administrasi.

- a) Mendapatkan rencana kegiatan Bagian Administrasi dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Bagian Administrasi yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada dan kekuatan personil Kesatuan Operasional Dasar (POLRES) / Polres secara keseluruhan yang dapat dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data dukungan logistik baik dari satuan atas maupun instansi samping.
- d) Mendapatkan data kekuatan senjata api dan amunisi yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- e) Mendapatkan data kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- f) Mendapatkan data alat dan alsus yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

4) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Lalu Lintas.

- a) Mendapatkan rencana kegiatan Satuan Lalu Lintas dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Satuan Lalu Lintas yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data kekuatan kendaraan bermotor baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data rencana route dan pengalihan arus lalu lintas pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada.
- e) Mendapatkan data kekuatan instansi lain (DLLAJ, Jasa Raharja, Dinas Pu) yang terlibat dalam pengamanan kampanye Pilkada.

- f) Mendapatkan data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan kampanye Pilkada sebelumnya.
- g) Mendapatkan data kendaraan yang disiapkan dalam keadaan darurat untuk mengangkut kekuatan pengamanan maupun massa partai atau masyarakat yang memerlukan.
- h) Mendapatkan data kendaraan derek yang disiapkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- i) Mendapatkan data alat khusus Satuan Lalu Lintas yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

5) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Samapta.

- a) Mendapatkan rencana kegiatan Satuan Samapta dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Satuan Samapta yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data patroli dan pengamanan proyek / obyek vital yang dilaksanakan Satuan Samapta selama pengamanan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data kekuatan kendaraan bermotor baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang dapat dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- e) Mendapatkan data alat khusus yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

6) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Reserse Kriminil.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Satuan Reserse Kriminil dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Satuan Reserse Kriminil yang dilibatkan.
- c) Mendapatkan data daftar residivis pelaku tindak pidana.
- d) Mendapatkan data tindak kejahatan kampanye Pilkada yang terjadi sebelumnya.
- e) Mendapatkan data penyidik tindak pidana kampanye Pilkada 2004.
- f) Mendapatkan data alat khusus Satuan Reserse Kriminil yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

7) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Narkotika dan obat berbahaya lainnya.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Sat Narkoba dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Sat Narkoba yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data kejahatan penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya lainnya pada kampanye tahun sebelumnya.
- d) Mendapatkan data daftar residivis Narkotika dan obat berbahaya lainnya.
- e) Mendapatkan data kekuatan kendaraan bermotor Sat Narkoba baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- f) Mendapatkan data alat khusus Sat Narkoba yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- g) Mendapatkan data daftar penyidik tindak pidana Narkotika dan obat berbahaya lainnya, dalam kampanye Pilkada.
- h) Mendapatkan data jenis-jenis Narkotika dan obat berbahaya lainnya yang sering disalahgunakan.

8) Koordinasi Bagian Operasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan SPK dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil SPK yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data laporan masyarakat tentang pelanggaran dan kejahatan selama pengamanan kampanye Pilkada.

9) Koordinasi Bagian Operasi dengan Urusan Telematika.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Ur Telematika dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan Ur Telematika yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data alat komunikasi yang dapat digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data Informasi perkembangan situasi Kamtibmas selama pengamanan kampanye Pilkada.

10) Koordinasi Bagian Operasi dengan Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin.

- a) Mendapatkan rencana kegiatan Unit P3D dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Unit P3D yang dapat dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data kekuatan kendaraan bermotor Unit P3D baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data daftar anggota Polri yang sedang melaksanakan tindakan disiplin.
- e) Mendapatkan data daftar anggota Polri yang cenderung melanggar disiplin.

11) Koordinasi Bagian Operasi dengan Tata Urusan Dalam.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Taud dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Taud yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data surat menyurat dan dokumentasi penyelenggaraan rapat koordinasi yang berkaitan dengan pengamanan kampanye Pilkada.

12) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Pengamanan Obyek Vital.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Sat-Pam obvit dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Sat-Pam Obvit yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data Obyek vital yang meliputi proyek / instalansi vital, kawasan industri, dan obyek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus yang saat ini sudah mendapatkan pengamanan dan yang belum.
- d) Mendapatkan data kekuatan yang dibutuhkan dalam pengamanan Obyek Vital.

13) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Pengamanan Pariwisata.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Sat-Pam wisata dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Sat-Pam wisata yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

- c) Mendapatkan data lokasi pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan manca negara dan wisatawan lokal.

14) Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan atau Unit Polisi Perairan.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Sat Pol Air atau Unit Pol Air yang dilibatkan dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan personil Sat Pol Air atau Unit Pol Air yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data wilayah perairan yang digunakan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data kekuatan alat transportasi perairan yang digunakan dalam pengamanan kampanye Pilkada.

15) Koordinasi Bagian Operasi dengan Seksi Kedokteran dan Kesehatan.

- a) Mendapatkan data rencana kegiatan Sidokkes dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- b) Mendapatkan data kekuatan Sidokkes yang dilibatkan dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- c) Mendapatkan data kekuatan kendaraan bermotor Sidokkes baik roda 4 (empat) ambulan maupun roda 2 (dua) yang dapat digunakan dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada.
- d) Mendapatkan data dukungan obat-obatan suplemen untuk anggota Polri dan unsur pengamanan lainnya bantuan dari satuan atas maupun instansi samping.

II. Kerja Sama kepolisian dan dengan Instansi Pemerintah Daerah.

Guna mewujudkan pelaksanaan kampanye Pilkada berjalan aman dan sukses Kepolisian perlu bekerja sama dan bekerja bersama-sama dengan instansi pemerintah yang terkait dan mendayagunakan potensi masyarakat yang ada, antara lain :

a. Koordinasi Polres dengan KPU Kabupaten / Kota.

- 1) Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya terjadi perpecahan di beberapa partai besar yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaiannya maka pada saat kampanye Pilkada dijadwalkan pelaksanaannya tidak bersamaan waktunya (dipisahkan), untuk menghindari konflik horisontal maupun vertikal, disini POLRES diharapkan dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten / Kota.

- 2) Penentuan sanksi oleh KPU kepada partai peserta kampanye Pilkada yang melanggar ketentuan sehingga berakibat penghentian kampanye selama masa kampanye Pilkada, sebelumnya dikoordinasikan dengan Polri / POLRES.
- 3) Penyerahan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik oleh KPU untuk dilaksanakan penyidikan kiranya perlu diperhatikan syarat-syarat formil penyidikan yang akan dilaksanakan oleh Polri yaitu adanya tersangka / pelaku, saksi-saksi dan barang bukti.
- 4) Untuk mengeliminir pelanggaran pelaksanaan kampanye dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana maka perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan kampanye Pilkada oleh KPU Kabupaten dan POLRES / Polres.

b. Koordinasi POLRES dengan Panwaslu Kabupaten / Kota.

- 1) Penyerahan melalui KPU tentang telah terjadinya pelanggaran yang mengandung pidana untuk dilakukan penyidikan diharapkan memenuhi syarat formil yaitu adanya pelaku / tersangka, saksi-saksi dan barang bukti.
- 2) Penunjukan anggota Polri yang duduk dalam Panwaslu dikoordinasikan terlebih dahulu.

c. Koordinasi POLRES dengan Panwaslu Kabupaten / Kota.

- 1) Dalam rangka menjalankan pemantauan pelaksanaan kampanye Pilkada bersama-sama dengan Polri / POLRES.
- 2) Bagi Pamatlu yang berasal dari perwakilan pemerintahan luar negeri agar melaporkan keberadaanya ke Polri / POLRES.

d. Koordinasi POLRES dengan Pengurus Partai/Calon Pasangan Bupati/Walikota Peserta Pilkada.

- 1) Pengamanan juru kampanye Pilkada.
- 2) Pengamanan tokoh-tokoh partai atau tamu VIP yang hadir dalam kampanye Pilkada.
- 3) Pengamanan lokasi dilaksanakannya kampanye Pilkada.
- 4) Pengamanan tempat berkumpul massa partai peserta kampanye Pilkada sebelum berangkat ke lokasi kampanye Pilkada.
- 5) Pengamanan route massa partai peserta kampanye Pilkada pada saat berangkat dan kembali.

- 6) Pengamanan penyebaran dan atau penempelan tanda gambar partai peserta kampanye Pilkada kepada dan di tempat umum.
- 7) Pengamanan kantor, sarana dan prasarana partai peserta kampanye Pilkada selama kampanye Pilkada.
- 8) Pengamanan tempat tinggal pengurus partai peserta kampanye Pilkada.
- 9) Pelibatan Satuan Penugasan (Sat Gas) partai peserta kampanye Pilkada dalam pelaksanaan pengamanan kampanye Pilkada dibawah kendali POLRES.
- 10) Perijinan / pemberitahuan kepada Polri / POLRES sebelum dilaksanakannya kampanye Pilkada untuk diantisipasi lebih awal.
- 11) Dalam rangka memenuhi syarat formal proses penyidikan atas pelanggaran yang mengandung pidana yang dilakukan baik oleh panitia kampanye maupun massa partai peserta kampanye Pilkada.

e. Koordinasi POLRES dengan Pemerintahan Kabupaten / Kota.

- 1) Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten / Kota.
 - a) Melaksanakan penerangan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kampanye Pilkada dapat dilaksanakan dengan tertib dan aman.
 - b) Sosialisasi Undang-undang Pemilihan Umum.
 - c) Merumuskan unsur-unsur pidana dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten / Kota.
 - a) Penyediaan tempat / lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi kampanye Pilkada ditinjau dari segi keamanan bagi masyarakat sekitar lokasi kampanye Pilkada dan bagi partai peserta kampanye Pilkada.
 - b) Penyediaan tempat / lokasi penempatan / penempelan tanda gambar partai peserta kampanye Pilkada.
 - c) Melaksanakan pengecekan kondisi jalan dari dan menuju ke lokasi kampanye Pilkada.
- 3) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintahan Kabupaten / Kota.
 - a) Bersama-sama dengan Satuan Lalu Lintas POLRES melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi kampanye maupun route dari dan menuju lokasi kampanye Pilkada.

- b) Melakukan pengalihan arus lalu lintas bilamana terjadi kemacetan lalu lintas pada saat kampanye Pilkada.
 - c) Menertibkan kendaraan baik roda 2 (dua) maupun 4 (empat) yang digunakan untuk kampanye Pilkada selama berlangsungnya kampanye Pilkada.
 - d) Melaksanakan pengawalan juru kampanye dan atau VIP atas permintaan panitia penyelenggara.
- 4) Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintahan Kabupaten / Kota.
- a) Menyiagakan personil dan kendaraan pemadam kebakaran untuk antisipasi terjadinya kebakaran dan atau menghalau massa pada saat terjadi kerusuhan.
 - b) Mendatakan kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan negara / daerah dan swasta yang dapat digunakan / disiagakan untuk kepentingan pengamanan kampanye Pilkada.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten / Kota.
- a) Penertiban pedagang kaki lima disekitar lokasi kampanye dan atau ruas-ruas jalan dari dan menuju lokasi kampanye Pilkada, agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
 - b) Melaksanakan patroli di daerah rawan konflik antar massa pendukung partai peserta kampanye Pilkada.
 - c) Pengamanan kantor instansi pemerintah dan fasilitas umum milik pemerintah.
 - d) Melaksanakan pengawasan terhadap alat peraga partai peserta pilkada di tempat umum.
- 6) Pertahanan Sipil (Hansip) Pemerintahan Kabupaten / Kota.
- a) Pengaturan dan penjagaan massa partai peserta kampanye Pilkada di lokasi kampanye Pilkada.
 - b) Pengamanan tempat transit juru kampanye, panggung kampanye, tempat hiburan selama kampanye Pilkada berlangsung.
 - c) Pengaturan dan pengamanan kendaraan peserta kampanye di lokasi parkir.
 - d) Pengamanan masyarakat di sekitar lokasi kampanye Pilkada.

- e) Pengamanan massa partai peserta kampanye dari gangguan masyarakat di sekitar lokasi kampanye Pilkada.

f. Koordinasi POLRES dengan Komando Distrik Militer (POLRESIM).

- 1) Informasi dari Intel Polresim tentang perkembangan situasi masyarakat selama pelaksanaan kampanye Pilkada, dalam kegiatan penangkalan (pre-emptif).
- 2) Pelaksanaan patroli dan penjagaan di daerah rawan konflik antar massa partai peserta kampanye Pilkada, dalam kegiatan pencegahan (preventif).
- 3) Pelaksanaan pengamanan kegiatan kampanye di lokasi kampanye, dan bilamana terjadi kejahatan dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilaksanakan oleh Polri.

g. Koordinasi POLRES dengan Kejaksaan Negeri.

- 1) Informasi dari Intel kejaksaan tentang perkembangan pelaksanaan kampanye Pilkada oleh partai peserta kampanye selama pelaksanaannya (ada tidaknya pelanggaran oleh juru kampanye Pilkada).
- 2) Percepatan penyelesaian penyidikan berkas perkara tindak pidana Pilkada dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pilkada.
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai anggota Panitia Pengawas Pilkada.

h. Koordinasi POLRES dengan Pengadilan Negeri.

- 1) Percepatan penyelesaian penyidikan berkas dalam hal surat persetujuan dan atau surat ijin penyitaan barang bukti.
- 2) Informasi perkembangan persidangan kasus tindak pidana Pilkada.

i. Koordinasi POLRES dengan Potensi Masyarakat.

- 1) Tokoh Agama / ulama.
 - a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui dakwah-dakwah keagamaan.
 - b) Penciptaan suasana sejuk dan harmonis di antara pemeluk agama.
 - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik massa pendukung partai melalui pesan-pesan agama.
- 2) Tokoh Pemuda.

- a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat khususnya pemuda melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan.
 - b) Penciptaan suasana damai di antara para pemuda dan remaja.
 - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik antar massa pendukung partai peserta kampanye Pilkada melalui jalur kepemudaan.
- 3) Tokoh Masyarakat.
- a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
 - b) Penciptaan suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan atau pilihan serta dukungan seorang kepada salah satu partai peserta kampanye Pilkada.
 - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik antar massa pendukung partai peserta kampanye dengan kekuatan kharismaniknya di masyarakat.
- 4) Tokoh Adat.
- a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan adat istiadat daerah.
 - b) Penciptaan suasana saling menghargai perbedaan pendapat, pilihan dan dukungan seseorang atau kelompok kepada salah satu partai peserta kampanye Pilkada.
 - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik antar massa pendukung calon kepala daerah pada kampanye Pilkada dengan pendekatan adat.

III. Melakukan Sistem Pengamanan Pilkada Tahun 2013

Dengan memperhatikan prediksi pelanggaran dan kejahatan Pilkada tahun 2004 yang dimungkinkan terjadi serta dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan kampanye baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang maupun kendala intern dan ekstern POLRES maka dapat dirumuskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh POLRES dan merupakan suatu sistem atau rangkaian kegiatan pengamanan selama kampanye Pilkada adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Mewujudkan Situasi Kampanye yang Kondusif.

Sebelum memasuki masa kampanye terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kesatuan Operasional Dasar (POLRES), untuk menciptakan situasi

Kamtibmas yang kondusif yaitu dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan atau operasi Kepolisian antara lain :

a. Melaksanakan Operasi Inteljen.

Yaitu operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mendeteksi berbagai kerawanan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam stabilitas nasional. Berkaitan dengan situasi menjelang kampanye Pilkada maka kegiatannya diarahkan untuk mendapatkan bahan keterangan mengenai gejolak / gelagat perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial politik, antara lain :

- 1) Sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan politik praktis.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan partai politik dalam masyarakat.
- 3) Perkembangan kegiatan politik praktis dalam masyarakat dan sikap serta tanggapan yang timbul terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dibidang politik.
- 4) Kegiatan politik dan tokoh-tokoh masyarakat (pemuka masyarakat, tokoh-tokoh eks partai politik, tokoh-tokoh masyarakat tertentu).
- 5) Kegiatan dan sikap politik golongan-golongan ekstrim yang ada (ekstrim kiri, kanan dan lain-lain).
- 6) Sikap dan tanggapan negatif dari kelompok-kelompok pemuda / mahasiswa terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
- 7) Melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar mendukung dan mengamankan semua kebijaksanaan yang akan / telah digariskan pimpinan Polri di pusat maupun daerah / wilayah yang berkaitan dengan pengamanan kampanye Pilkada.

Kegiatan operasi inteljen dapat berupa penyelidikan inteljen yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan untuk kepentingan taktis yaitu untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil dengan resiko yang diperhitungkan dan untuk menentukan cara bagaimana mempergunakan sarana-sarana yang ada di POLRES secara berdaya guna dan berhasil guna dalam masa kampanye.

b. Melaksanakan Operasi Simpatik Lalu Lintas.

Yaitu operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk menciptakan situasi tertib berlalu lintas, bagi para pemakai jalan dengan harapan pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada yang sarat dengan kegiatan konvoi kendaraan bermotor baik roda 2 (

dua), roda 4 (empat) atau lebih dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar terkendali dan tidak didapati pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Selama pelaksanaan operasi simpatik lalu lintas, selain untuk mendisiplinkan masyarakat pemakai jalan, juga sekaligus menertibkan rambu-rambu lalu lintas yang ada dan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan baku jalan, untuk pelaksanaannya melibatkan satuan operasional Polri / POLRES diluar Satuan Lalu Lintas dan dukungan instansi pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota.

c. Melaksanakan Operasi Senjata Tajam dan Senjata Api.

Yaitu Operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mengendalikan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api serta alat pemukul lainnya yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan. Dengan harapan pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada tidak ditemukan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam, senjata api baik yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kampanye maupun massa simpatisan partai peserta kampanye dan masyarakat lainnya, agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif.

d. Melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat).

Yaitu operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat yang dikategorikan penyakit masyarakat antara lain : minum-minuman keras di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, Penjaja Seks Komersial (PSK), gelandangan dan pengemis jalanan (Gepeng), perjudian, dengan harapan pada saat memasuki masa kampanye tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain keempat operasi Kepolisian diatas, dapat dilaksanakan operasi Kepolisian lainnya yang bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif menjelang, pada masa kampanye dan pasca kampanye Pilkada.

2) Kegiatan pembuatan kesepakatan antar partai politik/tim sukses peserta Pilkada.

Sebelum dilaksanakan kampanye, seluruh pengurus partai politik tim sukses calon dan Komandan Satuan Penugasan (Dansatgas) partai diundang di Mapolres untuk membuat kesepakatan bersama tentang langkah-langkah penciptaan situasi kondusif (aman dan tertib) selama pelaksanaan kampanye. Kesepakatan dimaksud bersifat mengikat kepada seluruh partai peserta Pilkada, hal ini dilakukan dengan harapan tidak terjadi pelanggaran kampanye selama kampanye Pilkada berlangsung.

Kesepakatan yang dibuat oleh para pengurus partai peserta Pilkada dan Komandan Satuan Penugasan masing-masing partai setidaknya-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kampanye Pilkada merupakan hak seluruh peserta Pilkada yang harus dihormati pelaksanaannya.
- b. Selama pelaksanaan kampanye, oleh salah satu partai peserta kampanye maka partai peserta Pilkada lainnya berupaya mengamankan massa simpatisan partainya untuk tidak mengganggu partai yang sedang melaksanakan kampanye.
- c. Pada saat melaksanakan kampanye, penyelenggara kampanye wajib menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan kelancaran lalu lintas baik di tempat berkumpul, sepanjang route yang dilewati dan di lokasi kampanye.
- d. Komandan Satuan Penugasan Partai (Dansatgas) dapat mengikutsertakan anggotanya dalam pengamanan kampanye oleh partai lainnya.
- e. Kendali Satuan Penugasan Partai (Satgas Partai) selama mengikuti pengamanan kampanye diserahkan kepada Polri.
- f. Pada kesempatan pertama melaporkan kepada Polri tentang adanya indikasi konflik antar massa simpatisan partai dan ikut serta dalam penyelesaiannya.

3) Kegiatan Pembentukan Kekuatan Gabungan.

Dalam rangka mewujudkan sukses pengamanan kampanye Pilkada bukan semata-mata tanggung jawab Polri dalam hal ini Kesatuan Operasional Dasar / Polres saja, namun merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan antara lain instansi pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten / Kota, Pengamat Pilkada Kabupaten / Kota, Partai Peserta Kampanye Pilkada dan Potensi Masyarakat, maka pelibatan kekuatan perlu diorganisir agar menjadi satu kekuatan yang utuh dan terarah selama pengamanan kampanye.

Karena POLRES / Polres adalah lembaga negara yang paling bertanggung jawab dalam penciptaan keamanan selama kampanye maka inisiatif penggabungan harus berasal dari POLRES / Polres dengan sendirinya POLRES / Polres harus aktif dalam proses pembentukan kekuatan gabungan. Adapun kekuatan gabungan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kekuatan Kesatuan Operasional Dasar / POLRES.
 - 1) Kekuatan Satuan Intelkam.
 - 2) Kekuatan Bagian Binamitra.

- 3) Kekuatan Satuan Samapta.
 - 4) Kekuatan Satuan Lalu Lintas.
 - 5) Kekuatan Satuan Reserse Kriminil dan Satuan Narkoba.
 - 6) Kekuatan Satuan Cadangan.
 - 7) Kekuatan Satuan Pendukung.
- b. Kekuatan Instansi Pemerintah.
- 1) Kekuatan anggota Polresim.
 - 2) Kekuatan Satpol PP Kabupaten / Kota.
 - 3) Kekuatan DLLAJ Kabupaten / Kota.
 - 4) Kekuatan Dinas P.U Kabupaten / Kota.
 - 5) Kekuatan Dinas PMK Kabupaten / Kota.
 - 6) Kekuatan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
 - 7) Kekuatan Hansip Kabupaten / Kota.
 - 8) Kekuatan Bagian Hukum Kabupaten / Kota.
 - 9) Kekuatan Pegawai Kejaksaan Negeri (Intel Kejaksaan dan Penuntut Umum).
 - 10) Kekuatan Pegawai Pengadilan Negeri.
- c. Kekuatan Lembaga Penyelenggara Kampanye Pilkada.
- 1) Kekuatan anggota KPU Kabupaten / Kota.
 - 2) Kekuatan anggota Panwaslu Kabupaten / Kota.
 - 3) Kekuatan anggota Pamatlu Kabupaten / Kota.
- d. Kekuatan Partai Peserta Pilkada.
- 1) Kekuatan pengurus partai peserta Pilkada.
 - 2) Kekuatan Satuan Penugasan (Satgas) partai.
- e. Kekuatan Potensi Masyarakat.

- 1) Kekuatan para tokoh masyarakat.
 - 2) Kekuatan para tokoh ulama / agama.
 - 3) Kekuatan para tokoh pemuda.
 - 4) Kekuatan para tokoh adat.
- f. Kekuatan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- 1) Kekuatan anggota FKPP.
 - 2) Kekuatan anggota Rapi.
 - 3) Kekuatan anggota Orari.
 - 4) Kekuatan anggota Satpam.
 - 5) Kekuatan anggota Pramuka.
 - 6) Kekuatan anggota Panca Marga.
 - 7) Dan lain-lain kekuatan yang ada di POLRES.

Dari kekuatan-kekuatan yang ada di tingkat POLRES agar didatangkan dan dikoordinir sesuai dengan fungsi, peran, tugasnya masing-masing dalam rangka mendukung dan membentuk sistem pengamanan kampanye Pilkada secara terpadu.

4). Kegiatan Penangkalan (Pre-emptif).

Yaitu kegiatan yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat, agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas keamanan dalam negeri.

Dalam kegiatan penangkalan (pre - emptif) satuan operasional Polri yang dikedepankan yaitu Bagian Binamitra dan atau satuan operasional lainnya yang mengemban fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan harapan pada saat memasuki masa kampanye timbul kepedulian masyarakat dalam penciptaan situasi Kamtibmas yang kondusif. Selain itu perlu keikutsertaan instansi pemerintah dan potensi masyarakat dalam kegiatan penangkalan (pre-emptif) dimaksud, seperti halnya : Bagian Hukum pemerintahan Kabupaten / Kota, Pegawai Kejaksaan Negeri dalam rangka bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Selain melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, kegiatan penangkalan dapat dilaksanakan melalui pemasangan spanduk-spanduk, penyebaran pamflet-pamflet / selebaran-selebaran yang berisi himbauan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi kampanye Pilkada. Terhadap tokoh-tokoh ulama / agama dengan menitipkan pesan-pesan kamtibmas agar disampaikan pada saat memberikan dakwah, kebaktian, dan lain-lain kepada umatnya, demikian juga terhadap tokoh masyarakat lainnya pesan-pesan kamtibmas dapat dititipkan untuk disampaikan kepada masyarakat dalam acara kemasyarakatan.

5). Kegiatan Pencegahan (Preventif).

Yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir perkembangan dan berubahnya hakikat ancaman kamtibmas dari ancaman potensial menjadi ancaman kamtibmas. Dalam Kesatuan Operasional Dasar (POLRES) Satuan Operasional Polri yang dikedepankan dalam kegiatan pencegahan (preventif) yaitu Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas didukung oleh satuan operasional Polri lainnya yaitu Satuan Reserse Kriminal, Satuan Intelkam dan Satuan Narkoba serta Bagian Binamitra.

Kegiatan pencegahan (preventif) dilaksanakan sejak pra kampanye, masa kampanye sampai dengan purna kampanye dengan sistim pengamanan yang berbeda disesuaikan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi. Dari 7 (tujuh) bentuk pelaksanaan kampanye Pilkada dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sistim pengamanan antara lain :

- a. Sistim pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk rapat umum, tatap muka dan pertemuan terbatas.
- b. Sistim pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyiaran melalui radio dan atau televisi.
- c. Sistim pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik serta pemasangan alat peraga di tempat umum.

Dari ketiga pengelompokan sistim pengamanan tersebut, kegiatan pencegahan (preventif) yang dilaksanakan adalah berbeda disesuaikan dengan sasaran pengamanan masing-masing, dan yang paling rawan dan membutuhkan perkuatan maksimal baik dari POLRES maupun dukungan instansi pemerintah dan potensi masyarakat adalah sistim pengamanan kampanye dengan bentuk rapat umum, tatap muka dan pertemuan terbatas karena melibatkan massa partai yang berdatangan dan atau didatangkan dari berbagai tempat menuju satu lokasi kampanye.

Panitia penyelenggara kampanye (pengurus partai peserta kampanye) sebelum melaksanakan kampanye membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres melalui Kasat Intelkam paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum hari " H " jam " J " pelaksanaan kampanye, disarankan pemberitahuan dimaksud dilakukan lebih awal yaitu setidaknya 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sebelumnya, dengan harapan dapat memberi kesempatan waktu bagi Polri dan aparat keamanan lainnya, berkoordinasi, merencanakan dan mempersiapkan sistim pengamanan yang akan dilaksanakan.

Dalam surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan kampanye pilkada yang ditujukan kepada Polri setempat, disertai penjelasan mengenai :

- a. Maksud dan tujuan kegiatan (kampanye Pilkada).
- b. Tempat berkumpulnya massa peserta kampanye.
- c. Lokasi kampanye.
- d. Route yang dilalui massa peserta kampanye Pilkada.
- e. Waktu dan lamanya kampanye Pilkada.
- f. Bentuk kampanye Pilkada.
- g. Penanggung jawab kampanye Pilkada.
- h. Nama, alamat partai penyelenggara kampanye Pilkada.
- i. Alat peraga yang digunakan.
- j. Jumlah massa peserta kampanye pilkada.

Setelah menerima surat pemberitahuan dimaksud, Kasat Intelkam melaporkan kepada Kapolres dan atas perintah Kapolres, Kasat Intelkam memberikan Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye kepada panitia penyelenggara, dengan tembusan surat ditujukan kepada berbagai instansi pemerintah dan atau lembaga lainnya yang berkepentingan serta kepada Satuan Atas (Polda dan Polwil) dan Kabagops Polres untuk disiapkan perencanaan sistim pengamanan kampanye, sebagai berikut :

- a. Umum.
 - 1) Hari " H " jam " J - 3 " petugas pengamanan sudah menempati lokasi pengamanan kampanye sesuai " plotting " masing-masing.
 - 2) Kepala pengamanan obyek / sektor melaksanakan APP dan mengecek jumlah kekuatan anggota dan perlengkapan yang digunakan dalam pengamanan.

- 3) Kepala pengamanan obyek mengawasi dan mengendalikan anggota / petugas pelaksana pengamanan dan melaporkan secara berjenjang perkembangan situasi di obyek / sektor pengamanannya.

b. Bagian Operasi.

- 1) Mempersiapkan surat perintah tugas pengamanan.
- 2) Setting kekuatan petugas pada obyek / sektor pengamanan.
- 3) Mengecek penempatan petugas sesuai obyek / sektor yang telah ditentukan dalam setting kekuatan.
- 4) Mengecek pelaksanaan pengamanan kampanye di masing-masing sektor / obyek melalui Kepala Sektor / Obyek dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi selama pengamanan kampanye kepada Kapolres.
- 5) Membuat laporan akhir pelaksanaan kampanye pada hari " H " ke Satuan atas (Pold) atas petunjuk Kapolres.

c. Bagian Bina Mitra.

- 1) Melaksanakan penerangan dan himbauan dengan pengeras suara kepada massa peserta kampanye di tempat berkumpul sebelum berangkat, di sepanjang route yang di lewati dan di lokasi kampanye agar massa kampanye melaksanakan kampanye dengan tertib, tidak melanggar peraturan lalu lintas dan mengutamakan keamanan diri pribadi dan orang lain.
- 2) Mengecek kesiapan Satuan Pengamanan (Satpam) proyek vital / obyek vital, pertokoan, pemukiman baik di sepanjang route yang di lewati massa kampanye maupun di sekitar lokasi kampanye agar meningkatkan kewaspadaan pengawasan dan penjagaannya proyek / obyek vital, serta membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar tempat pengamanannya.
- 3) Menghimbau kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh partai agar ikut serta dalam upaya pengamanan selama pelaksanaan kampanye pada hari " H " dengan melakukan pengamatan, pengawasan dan pengendalian warga masyarakat baik yang sedang melaksanakan kampanye maupun yang tidak ikut serta dalam kampanye, untuk saling menghormati perbedaan pendapat / pilihan sesuai keinginan masing-masing warga masyarakat.
- 4) Mengecek kesiapan kekuatan pramuka yang ikut serta dalam pengamanan kampanye untuk membantu pengamanan di lokasi kampanye maupun di ruas-ruas jalan dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas.

- 5) Mengecek kesiapan kendaraan pemadam kebakaran baik di lokasi kampanye maupun di tempat-tempat tertentu yang disiagakan yang berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten / Kota maupun dari perusahaan-perusahaan yang diikuti sertakan dalam pengamanan kampanye, pengendaliannya oleh Kabag Ops atas perintah Kapolres.
- 6) Mengecek kesiapan Satuan Penugasan (Sat gas) partai peserta kampanye Pilkada yang sedang melaksanakan kampanye maupun Satuan Penugasan (Sat gas) partai lain yang ikut berperan serta dalam pengamanan kampanye, yang melaksanakan pengamanan di lokasi kampanye, di sekitar lokasi kampanye dan di ruas-ruas jalan yang dilalui peserta kampanye yang dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Kepala Obyek / Sektor Pengamanan dan atau Kabag Ops.
- 7) Mengecek kesiapan petugas Orari dan Rapi yang ikut serta dalam pengamanan kampanye, untuk memberikan informasi melalui alat komunikasi elektronik ke Pos Pengamanan (Pospam) kampanye tentang perkembangan situasi, dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Ka Ur telematika dan atau oleh Ka Pospam kampanye.

d. Bagian Administrasi.

- 1) Menyiagakan kekuatan cadangan staf di Mapolres sewaktu-waktu digunakan untuk menambah kekuatan di lapangan atas perintah Kapolres.
- 2) Menyiapkan dukungan logistik petugas pengamanan baik yang di lapangan maupun yang siaga di Mapolres.
- 3) Menyiagakan senjata api dan amunisi yang digunakan dalam pengamanan sesuai perintah Kapolres.

e. Satuan Inteljen Keamanan.

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan panitia penyelenggara kampanye tentang hal-hal teknis :
 - a) Materi kampanye (agar tidak menyimpang).
 - b) Jadwal acara kegiatan kampanye sesuai waktu yang ditentukan.
 - c) Ketentuan-ketentuan dalam kampanye (harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

- 2) Melaksanakan pengawasan dan pencatatan kronologis jalannya kampanye.
- 3) Melaksanakan pengamanan tertutup terhadap panitia penyelenggara, juru kampanye dan tamu VIP.
- 4) Melaksanakan pencatatan pelanggaran kampanye.
- 5) Melaksanakan penyelidikan secara tertutup kemungkinan adanya sabotase, teror, intimidasi terhadap panitia penyelenggara, juru kampanye, massa kampanye atau sebaliknya melakukan sabotase, teror dan intimidasi kepada masyarakat.
- 6) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kampanye kepada Kapolres.

f. Satuan Samapta.

- 1) Mempersiapkan kekuatan Sat Samapta yang bertugas pengamanan di lokasi kampanye, bertugas mengawal juru kampanye atau VIP bersama-sama dengan Sat Lantas dan Sat gas partai serta Satpol PP dan Hansip Kabupaten / Kota.
- 2) Bertugas di proyek vital / obyek vital di sekitar lokasi kampanye dan atau sepanjang route yang di lewati massa kampanye.
- 3) Mengendalikan Satuan penugasan (Sat gas) partai peserta kampanye dan atau Sat gas partai lain yang ikut serta dalam pengamanan saat itu, agar berada dalam satu perintah / komando.
- 4) Bilamana terdapat lebih dari 1 (satu) partai yang melaksanakan kampanye pada hari dan jam yang sama maka disiapkan pasukan Samapta yang bertugas membatasi / menyekat daerah kampanye agar partai yang melaksanakan kampanye tidak bertemu pada satu titik, hal ini harus dihindari karena rawan terjadinya konflik horisontal antara massa simpatisan partai peserta Pilkada.
- 5) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pengamanan baik di lokasi kampanye maupun pengawalan kepada Kapolres.

g. Satuan Lalu Lintas.

- 1) Setting kekuatan lalu lintas dalam pengamanan route massa dari tempat berkumpul menuju ke lokasi kampanye.
- 2) Melaksanakan pengawalan panitia penyelenggara, juru kampanye dan tamu VIP serta massa partai dari tempat transit atau berkumpul ke lokasi kampanye.
- 3) Bersama-sama dengan petugas DLLAJ memperlancar dan mengalihkan arus lalu lintas.

- 4) Dengan menggunakan pengeras suara memberi penerangan kepada massa peserta kampanye agar tertib dalam perjalanan dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Mengendalikan Sat gas partai, pramuka yang ikut serta dalam pengamanan kampanye Pilkada.
- 6) Menyiagakan mobil derek yang dapat digunakan sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok dan atau kecelakaan untuk menghindari kemacetan lalu lintas.
- 7) Menyiagakan kendaraan truk, bus atau kendaraan lainnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengangkut pasukan cadangan atau mengangkut massa kampanye kembali dari lokasi kampanye, untuk menghindari tertumpuknya massa di lokasi kampanye.
- 8) Melaporkan setiap perkembangan kelancaran arus lalu lintas kepada Kapolres.

h. Satuan Reserse Kriminil.

- 1) Membagi kekuatan Reserse Kriminal menjadi unit-unit operasional Reserse yaitu :
 - a) Unit penyelidikan.
 - b) Unit penindakan.
 - c) Unit penyidikan (pemeriksaan)
 - d) Unit TPTKP.
- 2) Melaksanakan pengamanan tertutup terhadap panitia penyelenggara, juru kampanye, tamu VIP dan massa partai peserta kampanye dari teror, intimidasi dan kejahatan lainnya.
- 3) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana Pilkada yang dilaporkan oleh KPU maupun tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye Pilkada.
- 4) Melaksanakan penyelidikan terhadap residivis pelaku tindak pidana yang diprediksi akan melakukan tindak pidana selama pelaksanaan Pilkada berlangsung.
- 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri berkaitan dengan percepatan dan ketepatan penyidikan tindak pidana Pilkada dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pilkada.

- 6) Melaporkan pelaksanaan pengamanan kampanye Pilkada dan penyidikan yang dilaksanakan kepada Kapolres.

i. Satuan Narkoba.

- 1) Membagi kekuatan anggota Sat Narkoba menjadi unit-unit operasional yaitu :
 - a) Unit penyelidikan.
 - b) Unit penyidikan.
 - c) Unit penyitaan barang bukti.
- 2) Melaksanakan penyelidikan terhadap kemungkinan penyalahgunaan Narkoba oleh massa peserta kampanye pada saat mengikuti kampanye Pilkada.
- 3) Melaksanakan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar pada saat kampanye Pilkada.
- 4) Koordinasi dengan Dokter kesehatan dan laboratorium forensik Polri dalam rangka pembuktian secara medis dan ilmiah terhadap pelaku yang ditangkap.
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengamanan dan penyidikan tindak pidana Narkoba selama kampanye Pilkada kepada Kapolres.

j. Satuan Pengamanan Obyek Vital.

- 1) Melaksanakan pengecekan terhadap obyek vital yang perlu dilaksanakan pengamanan dan menyiagakan Satpam obyek vital yang tidak ada Satpamnya.
- 2) Menghimbau kepada pimpinan obyek vital untuk menyediakan tenaga Satpam dan atau tenaga keamanan swakarsa lainnya untuk menjaga obyek vitalnya.
- 3) Melaporkan setiap perkembangan situasi pengamanan obyek vital selama kampanye berlangsung kepada Kapolres.

k. Satuan Pengamanan Pariwisata.

- 1) Melaksanakan kegiatan pemantauan tentang kemungkinan adanya wisatawan asing yang berada di sekitar lokasi kampanye.
- 2) Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota mengenai pengamanan wisatawan asing yang berada di sekitar lokasi kampanye.
- 3) Melaporkan setiap perkembangan wisatawan asing pada saat kampanye berlangsung.

I. Unit Kedokteran Kesehatan.

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan penyediaan tenaga dokter dan perawat baik di rumah sakit maupun di Puskesmas serta kesiapsiagaan mobil ambulan di sekitar lokasi kampanye.
- 2) Melaksanakan pendistribusian obat-obatan suplemen kepada anggota di lapangan.
- 3) Melaporkan setiap perkembangan kepada Kapolres.

m. Urusan Telematika.

- 1) Melaksanakan pencatatan setiap perkembangan situasi pengamanan kampanye melalui alat komunikasi.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian terhadap anggota Orari dan Rapi yang ikut serta dalam pengamanan agar selalu melaporkan perkembangan situasi kampanye di sekitarnya.
- 3) Mendatakan pelanggaran, kegiatan kampanye yang terjadi dan melaporkan kepada Kapolres, setiap hari " H " pelaksanaan kampanye.

n. Sentra Pelayanan Masyarakat.

- 1) Melaksanakan penerimaan laporan masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan selama kampanye berlangsung.
- 2) Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara yang dilaporkan selama kampanye berlangsung.
- 3) Melaporkan setiap penerimaan laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan selama kampanye berlangsung dan setiap perkembangan penanganan TPTKP kepada Kapolres.

6. Kegiatan Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye (Represif).

Penegakan hukum merupakan salah satu dari sistem pengamanan kampanye, karena dengan penegakan hukum diharapkan dapat menanggulangi berbagai gangguan kriminalitas maupun pelanggaran hukum selama pelaksanaan kampanye Pilkada agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melanggar hukum.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kampanye Pilkada diberlakukan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang Pilkada, penyidikan oleh penyidik paling lambat 30 hari harus sudah selesai, dihitung sejak diterimanya laporan, dan 7 (tujuh) hari sejak selesainya penyidikan, penyidik Polri harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengamanan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/kota di 4 (empat) wilayah yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau, Polri melakukan pengorganisasian secara intern yaitu pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polri menjadi suatu kekuatan yang utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kabupaten / Kota, KPU Kabupaten / Kota, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panitia Penyelenggara Kampanye dan Potensi Masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistimatis sesuai tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada dapat berjalan aman dan tertib.
2. Sistem pengamanan Pilkada tahun 2013 di 4(empat) Kabupaten /kota, ditinjau dari 7 (tujuh) bentuk pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sistem pengamanan yaitu :
 - 1) Sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk rapat umum, tatap muka, dan pertemuan terbatas.
 - 2) Sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyiaran melalui radio dan atau televisi.
 - 3) Sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik serta pemasangan alat peraga di tempat umum.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan setelah dilakukan pengorganisasian baik intern Polri maupun bersama-sama dengan instansi terkait, lembaga Pilkada dan potensi masyarakat antara lain :

- 1) Kegiatan mewujudkan situasi kampanye yang kondusif.
- 2) Kegiatan pembuatan kesepakatan antar partai politik peserta Pilkada.
- 3) Kegiatan pembentukan kekuatan gabungan.
- 4) Kegiatan penangkalan (pre-emptif).
- 5) Kegiatan pencegahan (preventif).
- 6) Kegiatan penegakan hukum (represif).

Saran

1. Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan " Koordinasi ".

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya suksesnya pengamanan kampanye Pilkada bukan merupakan tanggung jawab Polri semata namun tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan kampanye Pilkada antara lain pemerintahan, Kabupaten / Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten / Kota, Pengamat Pilkada Kabupaten / Kota, Panitia Penyelenggara Kampanye (pengurus partai peserta Pilkada) dan Tim sukses calon maka kepada personil Polri utamanya para Perwira perlu dibekali kemampuan dan ketrampilan koordinasi baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri maupun yang dilaksanakan di luar Polri.

2. Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan " Negosiasi ".

Dalam penyelenggaraan pengamanan kampanye sering terjadi benturan kepentingan antara pemerintah Kabupaten / Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dengan Panitia Penyelenggara Kampanye (pengurus partai dan massa simpatisan partai) berkaitan dengan prosedur dan atau peraturan tentang kampanye maka untuk mengatasi hal ini diperlukan kemampuan dan ketrampilan negosiasi para petugas di lapangan terutama para Perwira pemegang kendali pengamanan sektor agar kegiatan kampanye dapat berjalan (dilaksanakan) dengan aman dan tertib, untuk itu disarankan untuk para Perwira khususnya dan anggota pada umumnya dibekali kemampuan dan ketrampilan sebagai negosiator melalui pendidikan formal maupun pelatihan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Kemampuan Mengelola Potensi Konflik.

Pengamanan kampanye Pilkada sarat dengan konflik kepentingan, seringkali masalah kecil dibuat besar hanya untuk kepentingan politik sesaat oleh sebagian para politikus, maka kemampuan mengelola potensi konflik yang mengendap dipermukaan atau didalam Astagatra sebagai faktor-faktor korelatif " kriminogen " tidak muncul menjadi ancaman faktual, hal ini penting untuk penciptaan kondisi Kamtibmas yang kondusif.

4. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

Komando dan pengendalian kekuatan di lapangan sangat ditentukan oleh seberapa efektifnya sarana komunikasi di lapangan, kurangnya alat komunikasi di lapangan dan kalaupun ada mudah diganggu oleh para pengguna frekuensi lainnya, maka untuk mendukung pelaksanaan operasi pengamanan kampanye disarankan untuk pengadaan sarana alat komunikasi yang baik dan mempunyai frekuensi khusus Polri agar tidak diganggu selama pengamanan kampanye demikian juga dengan sarana transportasi baik roda dua maupun roda empat atau lebih, perlu ditingkatkan pengadaannya untuk mendukung mobilitas pasukan dan anggota di lapangan.

5. Peningkatan pengadaan piranti lunak.

Piranti lunak berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pilkada terutama keputusan-keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat terbatas pengadaannya di tingkat Polres, walaupun ada didapat dengan susah payah membeli, meminta atau foto copy, demikian juga Juklak maupun Juknis dari Polri tentang Pengamanan Pilkada khususnya pengamanan kampanye sangat sulit didapat maka disarankan untuk pengadaan secara terpusat oleh Mabes Polri.

6. Bantuan pantauan dari udara dengan Helikopter.

Dalam rangka mengetahui pergeseran massa kampanye terutama pada saat lebih dari satu partai yang menyelenggarakan kampanye pada hari dan jam yang bersamaan, agar tidak bertemu pada satu titik, maka perlu dukungan pantauan dari udara dengan Helikopter (Back up Polda).

7. Dukungan dana anggaran dari APBD.

Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas kondusif selama pelaksanaan kampanye Pilkada khususnya dan pada umumnya selama pengamanan Pilkada tahun 2004, dibutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, bilamana menggunakan alokasi dana di Polri tidak mencukupi, maka perlu diajukan ke Pemerintah Kabupaten / Kota kebutuhan dukungan dana anggaran keamanan dan ketertiban masyarakat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Majalah, Koran

- Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*, Pustaka Pelajar, Semarang
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung.
- Daniel S. Salossa, 2005, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Denny Indrayana, Setya Arianto, A. Ahsin Thohari, Topo Santoso, Susi Dewi Harijanti, Lilis Mulyani, V.A Sapada, 2006. *Jurnal Demokrasi dan Ham*; Reformasi Hukum, Vol. 7 No. 1, 2007.
- Edwin, Donni, 2005. *PilkadaLangsung :Demokratisasi Daerah danMitos Good Governance*, Jakarta : Patner Ship : Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama,Semarang.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Langsung*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM PusDeham, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Muhammad Asfar, 2006, *Mendesain Managemen Pilkada*, Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan Ham, Surabaya.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Nuturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban, 2007.
- Poerwodarminto, W. J. S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, tt. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta: Sinar Baru..
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswojo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, Cetakan Kedua.

-----, dan Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.

Subhan Afifi, et.al (Editor), 2005, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Fisip UPN Veteran Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang *Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.